

Pendanaan Berkelanjutan di Sulawesi

Peran Konservasi dalam
Pembangunan Sosial Ekonomi



Pendanaan Berkelanjutan di Sulawesi

Peran Konservasi dalam
Pembangunan Sosial Ekonomi

Bappenas. 2020. *Pendanaan Berkelanjutan di Sulawesi: Peran Konservasi dalam Pembangunan Sosial Ekonomi*. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas.

Penyelaras Akhir:

Nur Hygiawati Rahayu

Tim Penulis:

Pungky Widiaryanto, Sacha Amaruzaman, Beria Leimona, Lalu Deden Yuda Pratama, Miranti Zulkifli

Pendukung:

Sylvanita Fitriana, Nurdita Rahmadani, Nadia Dwitia Kyati, Tikah Atikah, Riky Mulya Hilmansyah

Diterbitkan Oleh:



Didukung Oleh:



Daftar Isi

Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vi
Ringkasan	ix
1. Pendahuluan	1
2. Metode Kajian.....	5
3. Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>) Konservasi ke dalam Pembangunan.....	7
3.1 Keterkaitan Konservasi Lingkungan dengan Tujuan Pembangunan	7
3.2 Proses pengarusutamaan konservasi-pembangunan.....	8
3.2.1 Pengarusutamaan konservasi ke dalam Proses Perencanaan Nasional.....	8
3.2.2 Pengarusutamaan konservasi ke dalam Proses Anggaran.....	9
3.2.3 Pengarusutamaan konservasi dalam Proses Perencanaan Sektoral dan Subnasional	9
3.2.4 Pengarusutamaan konservasi ke dalam Proses Pemantauan Nasional	9
3.2.5 Mengelola Investasi Swasta di Sumber Daya Alam.....	10
4. Keterkaitan Kegiatan Konservasi dan Pembangunan Sosial-Ekonomi	11
4.1. Keterkaitan kegiatan konservasi di Sulawesi dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia.....	11
4.2. Kontribusi kegiatan konservasi Taman Nasional untuk pembangunan sosial ekonomi.....	24
5. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Kegiatan Konservasi	33
6. Kesimpulan dan Rekomendasi	43
6.1 Kesimpulan.....	43
6.2 Rekomendasi tindak lanjut	44
Referensi.....	47

Daftar Gambar

Gambar 1:	Jumlah Desa Pemberdayaan dan Sumber Pendanaan di Taman Nasional Lore Lindu 2020	28
Gambar 2:	Jumlah Desa Pemberdayaan dan Sumber Pendanaan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone 2020.....	30
Gambar 3:	Proporsi Anggaran KLHK untuk Sulawesi terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019.....	37
Gambar 4:	Proporsi Anggaran KLHK untuk Sulawesi terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020.....	37

Daftar Tabel

Tabel 1:	Metode dan keluaran studi	6
Tabel 2:	Anggaran Ditjen KLHK per Provinsi di Sulawesi per tahun 2019 & 2020 bagian dari PN (000 Rupiah)*.....	12
Tabel 3:	Gambaran kawasan konservasi di berbagai provinsi di Sulawesi	14
Tabel 4:	Alokasi Anggaran Per Kegiatan KLHK di Sulawesi tahun 2019-2020 (000 Rupiah)	16
Tabel 5:	Anggaran Output KLHK terkait dengan Prioritas Nasional di Sulawesi 2019-2020 (000 Rupiah)	18
Tabel 6:	Anggaran konservasi kehati KLHK untuk Sulawesi terkait Prioritas Nasional dan Program Prioritas tahun 2019 dan 2020 (000 Rupiah)	23
Tabel 7:	Jumlah Desa Penyangga di Kawasan Taman Nasional.....	25
Tabel 8:	Peluang dan Tantangan Kegiatan Konservasi melalui Pemberdayaan Masyarakat.....	27
Tabel 9:	Anggaran KLHK untuk Sulawesi terkait Tujuan dan Target TPB non-konservasi kehati tahun 2019 dan 2020	35
Tabel 10:	Alokasi Anggaran dan Output KLHK di Sulawesi 2019-2020 terkait TPB non-konservasi kehati	38

Kata Pengantar

Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pendanaan Berkelanjutan di Sulawesi: Peran Konservasi dalam Pembangunan Sosial Ekonomi dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran bagaimana kegiatan konservasi keanekaragaman hayati, baik melalui sumber pembiayaan konvensional maupun inovatif, dapat berkontribusi bagi pembangunan sosial-ekonomi dan pembangunan nonkonservasi lainnya bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi di Wilayah Sulawesi.

Secara umum, kontribusi konservasi terhadap pembangunan sosio-ekonomi tersebut dapat dipahami sebagai pengarusutamaan pembangunan ke dalam konservasi (*mainstreaming development for conservation*). Di tingkat nasional, keterkaitan antara pendanaan berkelanjutan di wilayah Sulawesi dengan berbagai tujuan pembangunan nasional ditelaah melalui pendekatan analisis anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui sumber pendanaan rutin dan perolehan dari mekanisme Surat Berharga Syariah Negara. Di tataran pelaksanaan, dilakukan identifikasi tantangan dan peluang pelaksanaan kegiatan konservasi untuk pemberdayaan masyarakat dan tujuan pembangunan lainnya berdasarkan perspektif Taman Nasional yang aktif dalam kegiatan proyek EPASS. Kontribusi kegiatan konservasi dari pemerintah terhadap berbagai tujuan pembangunan global ditelaah dengan membandingkan alokasi pendanaan untuk mendukung *output* (keluaran) kegiatan konservasi yang terangkum dalam Rencana Kerja KLHK dengan kerangka tujuan dan target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UNDP, ICRAF, dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu dalam pelaksanaan kajian ini. Diharapkan hasil kajian dapat meningkatkan tata kelola kawasan konservasi yang berkelanjutan, dari mulai kegiatan, kelembagaan, hingga pendanaannya.

Akhir kata, kami terbuka dengan saran dan kritik untuk penyempurnaan lebih lanjut, terutama agar pelaksanaan di tingkat tapak lebih optimal dan berhasil guna bagi kelestarian sumber daya hutan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

Desember 2020

Nur Hygiawati Rahayu

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
Kementerian PPN/Bappenas

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si (Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jendral KLHK)
2. Teguh Prio (Biro Perencanaan, Setjen KLHK)
3. Hari Priyadi (Technical Advisor, the World Bank)

Sebagai mitra yang telah memberikan ulasan berupa perbaikan, masukan teknis, dan rekomendasi kebijakan, terhadap naskah buku berjudul *Pendanaan Berkelanjutan di Sulawesi: Peran Konservasi dalam Pembangunan Sosial Ekonomi*. Hasil kajian beserta ulasan telah didiskusikan dan dibahas pada acara konsultasi publik pekan webinar pendanaan berkelanjutan kawasan konservasi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, UNDP, dan World Agroforestry (ICRAF) pada Selasa, 17 November 2020. Seluruh rangkaian acara dilaksanakan secara daring dan dapat disimak melalui tautan youtube bit.ly/PBKK-Topik3.

Ringkasan

Kebijakan pengentasan kemiskinan, terutama di desa-desa sekitar kawasan konservasi perlu diletakkan dalam konteks integrasi antara pembangunan pedesaan dan agenda kehutanan dengan tepat. Dengan memakai kerangka Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB), buku ini menelaah bagaimana kegiatan konservasi kehati, baik melalui sumber pembiayaan konvensional maupun inovatif, dapat berkontribusi bagi pembangunan sosial-ekonomi dan pembangunan non-konservasi lainnya bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi di Wilayah Sulawesi.

Metode yang dilakukan adalah dengan (1) penelaahan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui sumber pendanaan rutin dan perolehan dari mekanisme Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); dan (2) wawancara terhadap pengelola Taman Nasional yang aktif dalam kegiatan proyek *Enhancing the Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation* (EPASS), yaitu Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Gorontalo dan Sulawesi Utara.

Penandaan (*tagging*) anggaran dilakukan pada anggaran belanja non-operasional untuk pelaksanaan teknis kegiatan yang terhubung dengan Prioritas Nasional (PN), di luar anggaran belanja operasional, administrasi dan kesekretariatan. Hasil penandaan anggaran menunjukkan total anggaran konservasi kehati KLHK untuk Sulawesi berjumlah sebesar Rp669 miliar (sekitar USD48,8 juta pada kurs Rp13.500) pada tahun 2019 dan menjadi Rp352 miliar (USD26 juta) pada tahun 2020. Secara lebih rinci, alokasi anggaran KLHK terkait PN pengentasan kemiskinan di Sulawesi pada tahun 2019 dan 2020 mencapai Rp92 miliar (USD6,8 juta) dan Rp30 miliar (USD2,2 juta). Sedangkan alokasi anggaran terkait target TPB 1 tentang pengentasan kemiskinan adalah Rp86,6 miliar (sekitar USD6,4 juta) pada tahun 2019 dan menurun menjadi Rp45,9 miliar (USD3,4 juta) pada tahun 2020. Penurunan tersebut sebagian besar dikontribusikan dari selesainya pelaksanaan berbagai kegiatan dari program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) yang ditargetkan pada tahun 2019. Dapat disimpulkan, terdapat kontribusi yang cukup tinggi dari berbagai kegiatan konservasi terhadap PN maupun TPB yang terkait dengan Pengentasan Kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan konservasi memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi Taman Nasional dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat antara lain pendanaan yang masih mengandalkan APBN, jumlah personil Taman Nasional yang sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah desa penyangga sebagai target pemberdayaan, dan kapasitas personil yang masih minim pengalaman maupun pengetahuan dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan.

Sumber pendanaan alternatif di tingkat daerah (Dana Desa, APBD, dan *corporate social responsibility*/CSR lokal), maupun di tingkat pusat (SBSN, dana CSR nasional, dan lain sebagainya), dapat diperhitungkan sebagai inovasi pendanaan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Taman Nasional. Pengelola Taman Nasional masih memiliki keterbatasan dalam mengakses dan mensinergikan kegiatan pemberdayaan mereka dengan berbagai sumber pendanaan tersebut. Selain itu, dengan disahkannya Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemanfaatan jasa lingkungan air dari kawasan suaka alam tidak dapat dilakukan untuk tujuan komersil, sehingga kegiatan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat sekitar kawasan tidak dapat memanfaatkan potensi pendanaan jasa lingkungan air dari Taman Nasional. Di sisi lain, masyarakat sekitar kawasan masih dapat memanfaatkan jasa lingkungan air dari Taman Nasional untuk pembangunan infrastruktur skala lokal, seperti untuk sumber air minum skala desa dan rumah tangga, serta untuk pembangkit listrik mikro-hidro.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Taman Nasional memerlukan dukungan dari para pihak agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan dukungan dan Pemerintah Pusat dan kolaborasi yang lebih erat bersama parapihak yang terlibat dalam pembangunan lokal, baik Pemerintah Daerah maupun aktor pembangunan lokal lainnya seperti swasta dan LSM, agar Taman Nasional mampu memanfaatkan berbagai sumber pendanaan inovatif di luar APBN dan bantuan dari donor. Di tingkat nasional, Bappenas dan Kementerian/Lembaga perlu secara mendesak melakukan pengarusutamaan dua arah antara konservasi dan pembangunan sosio-ekonomi kepada para pemangku kepentingan konservasi, sesuai konteks dan kondisi di lapangan, dengan melibatkan pemerintah daerah.

Bab 1.

Pendahuluan

Keanekaragaman hayati (kehati) memiliki peran dan kontribusi terhadap pembangunan nasional di berbagai bidang. Kehati berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian suatu ekosistem dan mendukung penghidupan. Kehati juga mendukung ekosistem dalam memenuhi kebutuhan setiap makhluk hidup secara luas, yang antara lain meliputi penyediaan pangan, sumber daya alam untuk penghidupan, penyediaan air dan energi, pencegahan bencana alam, serta pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mencegah perubahan iklim.

Secara global, hampir setengah dari populasi manusia bergantung secara langsung pada sumber daya alam untuk mata pencahariannya, dan kelompok masyarakat yang paling rentan, umumnya mengandalkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di sekitar mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 50-60 juta orang di Indonesia menggantungkan penghidupan mereka terhadap sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, serta 9,22 juta orang lainnya hidup dari satwa liar dan perburuan untuk konsumsi domestik (FAO, 2009). Walaupun pada kenyataannya konservasi dapat berkontribusi terhadap penghidupan masyarakat, terdapat berbagai kasus pembelajaran di mana kegiatan konservasi dapat memperparah tingkat kemiskinan. Kawasan konservasi banyak dikritik sebagai penyebab marginalisasi ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan pengentasan kemiskinan, terutama di desa-desa sekitar kawasan konservasi perlu diletakkan dalam konteks integrasi antara pembangunan pedesaan dan agenda kehutanan dengan tepat.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB) telah menetapkan kerangka kerja universal dengan tujuan, target, dan indikator yang terintegrasi untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan global¹. TPB mendorong pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam pembangunan secara berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Elemen keanekaragaman hayati dan konservasi diutamakan dalam berbagai tujuan dan target terkait dari TPB. Keanekaragaman hayati merupakan motor penggerak dari banyak kegiatan ekonomi yang berkontribusi terhadap kesejahteraan, terutama melalui pemanfaatan sumber daya di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sebagai contoh, keanekaragaman hayati merupakan sumber penghidupan dan pendapatan bagi banyak masyarakat yang tinggal disekitar hutan, sehingga keanekaragaman hayati berkontribusi terhadap TPB 1 dalam mengentaskan segala bentuk kemiskinan. Contoh lainnya adalah dalam upaya mencapai TPB 6 guna menjamin ketersediaan dan pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan, kegiatan konservasi ekosistem menghasilkan jasa lingkungan yang berkontribusi terhadap penyediaan air bersih, selain fungsi-fungsi pengaturan ekosistem lainnya, seperti pencegahan banjir dan kekeringan. Dan tentunya, konservasi dapat berkontribusi terhadap TPB lainnya seperti TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 3 (Kesehatan) dan TPB 8 (Pertumbuhan Ekonomi & Pekerjaan) dengan kondisi tertentu.

¹ <https://www.cbd.int/cop/cop-14/media/briefs/en/cop14-press-brief-sdgs.pdf>

Saat ini, pemerintah Indonesia semakin menyadari pentingnya kehati dalam mendorong dan menopang pembangunan nasional. Komitmen politik, keselarasan kebijakan serta koordinasi di level pelaksanaan sangat diperlukan, demi menjamin perlindungan sumberdaya hayati dan pemanfaatan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan menempatkan kehati sebagai pilar sumberdaya pembangunan memerlukan arahan yang jelas, dalam bentuk strategi nasional dan rencana aksi yang dapat mudah diimplementasikan hingga ke daerah.

Salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 adalah **"Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup...". Namun, dalam pelaksanaannya aspek konservasi dan pengelolaan kehati dalam RPJMN 2015-2019 masih diletakkan sebagai sub-komponen dari Agenda Pembangunan Nasional untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (Agenda ke-7 RPJMN 2015-2019). Dalam RPJMN 2020-2024, pengelolaan dan konservasi kehati semakin diperhitungkan sebagai komponen utama dalam pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan ditempatkannya kehati sebagai salah satu dari empat pilar utama RPJMN 2020-2024, bersama dengan tiga pilar lainnya, yaitu pilar kelembagaan dan hukum, kesejahteraan masyarakat, dan struktur ekonomi. Selain itu, RPJMN 2020-2024 juga memposisikan aspek pengelolaan dan konservasi kehati sebagai salah satu komponen utama dari 7 Agenda Pembangunan Nasional, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Di tingkat global, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2015 – 2020 sebagai bagian dari komitmen global yang disepakati di dalam konvensi kehati internasional atau *Convention of Biodiversity* (CBD). IBSAP 2015-2020 berisi strategi nasional dan rencana aksi pengelolaan kehati Indonesia yang meliputi aspek-aspek yang relevan dengan isu kehati serta agenda prioritas pembangunan nasional dalam beberapa tahun ke depan, meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing bangsa serta kemandirian ekonomi.

Konsensus umum menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara capaian kegiatan konservasi dan pengentasan kemiskinan, meskipun tidak ada cetak biru bagaimana hal tersebut diimplementasikan (Roe *et al.*, 2013; Rai, 2019; Schleicher *et al.*, 2018). Hubungan kegiatan konservasi dan pengentasan kemiskinan bersifat dinamis dan spesifik untuk tiap konteks pelaksanaan (Barrett *et al.*, 2011). Upaya untuk membahas keterkaitan antara kegiatan konservasi dengan pembangunan telah banyak dibahas melalui kerangka kerja pengarusutamaan konservasi ke dalam berbagai kegiatan dan tahapan pembangunan (UNDP & UNEP, 2015). Namun, belum banyak kajian yang membahas mengenai kontribusi kegiatan konservasi terhadap berbagai tujuan pembangunan, serta bagaimana pengarusutamaan tujuan pembangunan dapat dilakukan melalui kegiatan konservasi.

Bappenas terus mendorong mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi, termasuk di wilayah di Sulawesi, melalui kebijakan penguatan peran konservasi untuk pembangunan sosial dan ekonomi serta pemanfaatan mekanisme pembiayaan inovatif untuk kawasan konservasi, antara lain melalui mekanisme SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Buku ini menguraikan bagaimana kegiatan konservasi kehati yang dilakukan oleh pemerintah dapat berkontribusi terhadap pencapaian berbagai tujuan pembangunan, terutama pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Secara umum, kontribusi konservasi terhadap pembangunan sosio-ekonomi tersebut dapat dipahami sebagai pengarusutamaan pembangunan ke dalam konservasi (*mainstreaming development for conservation*). Analisis dilakukan di skala nasional dan sub-nasional dengan mengacu pada ruang lingkup proyek *Enhancing the Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation* (EPASS) di wilayah Sulawesi.

Di tingkat nasional, keterkaitan antara pendanaan berkelanjutan di wilayah Sulawesi dengan berbagai tujuan pembangunan nasional ditelaah melalui pendekatan analisis anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui sumber pendanaan rutin dan perolehan dari mekanisme SBSN. Data alokasi anggaran untuk sektor konservasi diperoleh dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Di tataran pelaksanaan, dilakukan identifikasi tantangan dan peluang pelaksanaan kegiatan konservasi untuk pemberdayaan masyarakat dan tujuan pembangunan lainnya berdasarkan perspektif Taman Nasional yang aktif dalam kegiatan proyek EPASS, yaitu Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Gorontalo dan Sulawesi Utara. Sedangkan kontribusi kegiatan konservasi dari pemerintah terhadap berbagai tujuan pembangunan global ditelaah dengan membandingkan alokasi pendanaan untuk mendukung *output* (keluaran) kegiatan konservasi yang terangkum dalam Rencana Kerja KLHK dengan kerangka tujuan dan target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*.

Bab 2.

Metode Kajian

Analisis keterkaitan antara konservasi dengan pembangunan sosial ekonomi dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan mengidentifikasi Kementerian/Lembaga (K/L) dan sektor terkait di tingkat nasional, maupun provinsi di Sulawesi. Berdasarkan konsultasi dengan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, maka pembahasan difokuskan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai pemangku tupoksi utama terkait konservasi kehati. Informasi anggaran K/L diuraikan dalam bentuk tren anggaran selama 2 tahun terakhir melalui basis data Bappenas di tingkat nasional. Di tingkat kawasan konservasi, studi terhadap dua Taman Nasional yang terlibat dalam proyek EPASS ditelaah melalui wawancara dengan pihak-pihak pelaku konservasi.

Pembahasan anggaran pembangunan konservasi menggunakan data anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk wilayah Sulawesi tahun 2019 dan 2020, baik melalui unit di tingkat pusat maupun Satuan Kerja Vertikal yang berada di Sulawesi. Anggaran dan output Ditjen KLHK terkait bagi wilayah Sulawesi tersebut dirangkum dalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) dan dikompilasi oleh Bappenas. Kegiatan konservasi yang menjadi lingkup kajian adalah kegiatan yang terkait langsung dengan konservasi kehati, meliputi perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistem, pemanfaatan secara lestari, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi sebagai upaya untuk menunjang konservasi kawasan. Tagging anggaran dilakukan pada anggaran belanja non-operasional untuk pelaksanaan teknis kegiatan yang terhubung dengan Prioritas Nasional (PN), di luar anggaran belanja operasional, administrasi dan kesekretariatan.

KRISNA merupakan sistem aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja dari Pemerintah Indonesia. KRISNA merangkum Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga (K/L) dan menghubungkan komponen Renja K/L dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang diterbitkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Pusat. RKP memuat Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) tahunan sebagai turunan dari agenda pembangunan nasional yang tertuang di dalam RPJMN. Renja K/L antara lain memuat program, kegiatan, dan output dari kegiatan Kementerian/Lembaga.

Pembahasan difokuskan pada 6 (enam) direktorat di KLHK dengan tupoksi utama konservasi kehati, dimana kegiatan yang dilakukan keenam direktorat tersebut memiliki potensi dan irisan untuk mendukung pembangunan sosio-ekonomi dan pengentasan kemiskinan masyarakat, maupun pencapaian tujuan pembangunan lainnya. Keenam Direktorat Jenderal KLHK tersebut adalah:

1. Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL);
2. Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE);
3. Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan (PKTL);
4. Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL);
5. Ditjen Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P2SDM);
6. Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Analisis keterkaitan antara output kegiatan berdasarkan Renja KLHK dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dilakukan secara manual dengan berkonsultasi kepada narasumber dan ahli dari Bappenas dan World Agroforestry (ICRAF). Sedangkan studi kasus dilaksanakan melalui wawancara mendalam secara daring kepada perwakilan dua Taman Nasional (TN) untuk mendapatkan informasi mengenai dampak kegiatan dari TN yang berkontribusi terhadap pemberdayaan dan pembangunan sosio-ekonomi masyarakat, yaitu Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Tabel 1: Metode dan keluaran studi

Aktivitas	Metode	Jenis data
Identifikasi Direktorat Jenderal di KLHK yang memiliki tupoksi utama mengenai konservasi kehati yang terkait dengan pembangunan sosial ekonomi serta pengentasan kemiskinan masyarakat, terutama terkait dengan Prioritas Nasional 1 dan Prioritas Nasional 3	- Studi literatur RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024 - Rencana Kerja Pemerintah 2017-2020 - Wawancara dengan Bappenas	Daftar Direktorat Jenderal terpilih
Deskripsi dan analisis tren data anggaran Ditjen KLHK yang berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi di Sulawesi (2019-2020)	Analisis data sekunder dari Bappenas melalui Aplikasi KRISNA	Jumlah anggaran konservasi dan kegiatan pembangunan yang ditunjang Ditjen KLHK terpilih di tahun 2019 –2020 untuk Wilayah Sulawesi
Telaah studi kasus dua taman nasional di Sulawesi	- Wawancara dengan perwakilan Balai Pengelola TN di Sulawesi - Lore Lindu (18 Agustus 2020) - Bogani Nani Wartabone (19 Agustus 2020)	- Jenis kegiatan konservasi yang berkontribusi terhadap prioritas nasional dan TPB - Sumber Pendanaan - Dampak - Tantangan dan Peluang
Analisis hubungan konservasi dan pembangunan dengan kerangka TPB	- Studi literatur TPB untuk mendapatkan Tujuan dan Target non-konservasi kehati dalam kerangka kerja TPB - Telaah output kegiatan KLHK berdasarkan data dari KRISNA - Data kualitatif wawancara narasumber internal Bappenas dan ICRAF	Kontribusi konservasi terhadap pencapaian TPB

Bab 3.

Pengarusutamaan (Mainstreaming) Konservasi ke dalam Pembangunan

3.1 Keterkaitan Konservasi Lingkungan dengan Tujuan Pembangunan

Kajian ini membahas mengenai pengarusutamaan pembangunan sosial-ekonomi ke dalam konservasi (*mainstreaming development for conservation*) melalui telaah kontribusi konservasi terhadap pencapaian berbagai tujuan pembangunan. Secara umum, pembahasan mengenai pengarusutamaan konservasi terhadap berbagai tujuan pembangunan (pengarusutamaan pembangunan-konservasi) masih sangat terbatas. Sebaliknya, pembahasan mengenai upaya pengarusutamaan konservasi ke dalam kegiatan pembangunan telah banyak dilakukan melalui kerangka kerja pengarusutamaan konservasi ke dalam pembangunan (*mainstreaming conservation/environment for development*, lihat UNDP, 2015). Sebagai referensi untuk memahami proses pengarusutamaan isu pembangunan dalam konservasi, maka bagian ini menyoroti proses pengarusutamaan konservasi ke dalam pembangunan (konservasi-pembangunan) yang dijabarkan UNDP & UNEP (2015) di dalam publikasi panduan *Mainstreaming Environment and Climate for Poverty Reduction and Sustainable Development*.

Kemiskinan dan konservasi lingkungan terkait erat, karena kelompok masyarakat miskin umumnya memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam dan jasa lingkungan untuk kehidupan mereka. Keterkaitan kemiskinan-konservasi antara lain mencakup kerentanan terhadap perubahan lingkungan, seperti banjir, kekeringan, dan dampak perubahan iklim, serta strategi kehidupan dan ketahanan pangan masyarakat miskin yang secara langsung bergantung pada jasa lingkungan dan kualitas sumber daya alam. Hubungan antara pengentasan kemiskinan dan konservasi lingkungan menjadi semakin jelas karena kehidupan masyarakat miskin terus terancam oleh degradasi lingkungan akibat pengelolaan sumber daya alam yang buruk, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembangunan Berkelanjutan di Brasil pada bulan Juni 2012 (Rio+20) menyoroti perlunya solusi integrative untuk perencanaan pembangunan dan transisi ke pembangunan yang lebih bijak dan tangguh dalam penggunaan sumber daya alam untuk menghasilkan berbagai manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan. Penerapan solusi tersebut membutuhkan lebih dari sekadar keterlibatan kementerian lingkungan, yang biasanya dilihat sebagai aktor utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, kementerian keuangan dan perencanaan juga harus memahami bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan pengetahuan tentang nilai sumber daya alam selain nilai ekonomi, serta pemahaman mengenai pertumbuhan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dengan upaya pelestarian lingkungan.

Pengarusutamaan konservasi-pembangunan merupakan prosedur berkesinambungan yang bertujuan untuk mengintegrasikan tujuan konservasi lingkungan ke dalam proses pembuatan kebijakan, penganggaran dan implementasi di tingkat nasional, subnasional dan sektoral. Pengarusutamaan konservasi-pembangunan merupakan kolaborasi dan upaya multi-pihak dari aktor pemerintah (mis. Kementerian perencanaan, keuangan, lingkungan dan sektor; parlemen; dan otoritas lokal) maupun non-pemerintah (mis. masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, masyarakat umum dan media). Pengarusutamaan konservasi-pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan serta mencapai berbagai tujuan pembangunan nasional lainnya melalui pemanfaatan

sumber daya alam dan kehati secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan risiko perubahan iklim. Pengarusutamaan konservasi dicapai dengan menempatkan masalah konservasi lingkungan sebagai aspek pertimbangan utama dalam pemerintahan, dengan memasukkan masalah konservasi ke dalam proses pengambilan keputusan ekonomi arus utama, terutama proses perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah yang dipimpin oleh kementerian keuangan, perencanaan dan pemerintah daerah, dan didukung oleh kementerian lingkungan.

Dalam pembangunan, konservasi kehati dan lingkungan harus ditempatkan sebagai permasalahan lintas-sektor (*cross-cutting issue*). Sebagian besar masalah yang mempengaruhi lingkungan disebabkan oleh sektor pembangunan (misalnya pertanian dan infrastruktur); dengan demikian, menangani sektor-sektor ini melalui pengarusutamaan mendorong insentif keberlanjutan. Selain itu, dimungkinkan untuk melengkapi pengarusutamaan lingkungan sebagai masalah lintas sektoral dengan fokus pada lingkungan sebagai sektor dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Praktisi perlu memahami kondisi ekonomi-politik pengarusutamaan konservasi-lingkungan, terutama dalam mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dan titik masuk terbaik untuk kebijakan. Melakukan penilaian awal; mengidentifikasi dan memahami karakteristik target kebijakan; memahami konteks pemerintahan, kelembagaan dan politik; mengembangkan penilaian dampak, kerentanan dan adaptasi; menilai dan memperkuat kapasitas pengarusutamaan; meningkatkan mekanisme koordinasi untuk pengarusutamaan yang berkelanjutan; meningkatkan upaya penyadartahuan serta membangun kemitraan adalah kegiatan utama dalam menemukan titik masuk dan membuat kasus untuk pengarusutamaan.

3.2 Proses pengarusutamaan konservasi-pembangunan

Proses pengarusutamaan konservasi-pembangunan dapat dilakukan pada skala dan proses pembangunan yang berbeda. Proses pengarusutamaan konservasi ke dalam pembangunan dapat dilakukan ke dalam: 1) proses perencanaan di tingkat nasional; 2) proses perencanaan di tingkat subnasional dan sektoral; 3) proses penganggaran; 4) proses pemantauan pembangunan nasional; dan 5) investasi privat di dalam sumber daya alam (UNDP, 2015).

3.2.1 Pengarusutamaan konservasi ke dalam Proses Perencanaan Nasional

Untuk mengintegrasikan tujuan konservasi ke dalam proses perencanaan pembangunan nasional dengan baik, praktisi konservasi dan pembangunan harus mampu mengidentifikasi dan memahami proses perencanaan pembangunan yang ada, termasuk tahap elaborasi, implementasi dan pemantauan; tata waktu; serta institusi dan aktor yang terlibat. Upaya ini juga membutuhkan penilaian tentang seberapa efektif proses perencanaan dapat menghubungkan prioritas nasional, sektoral dan subnasional. Hubungan antara perencanaan dan penganggaran juga perlu dijelaskan dengan detail, karena rencana hanya efektif jika mampu mempengaruhi keputusan penganggaran. Keefektifan pengarusutamaan konservasi-pembangunan di tingkat nasional dan subnasional terlihat melalui bagaimana sistem perencanaan tingkat pusat menginformasikan rencana dan anggaran daerah, serta sebaliknya. Ada banyak pengalaman positif dari keberhasilan memasukkan isu lingkungan dan iklim yang berpihak pada masyarakat miskin ke dalam dokumen rencana nasional, tetapi implementasi dari solusi terhadap permasalahan lingkungan dan iklim perlu dilembagakan agar dapat terus berlanjut ketika dukungan pihak eksternal berakhir.

3.2.2 Pengarusutamaan konservasi ke dalam Proses Anggaran

Pengarusutamaan konservasi ke dalam proses anggaran mengindikasikan perlunya keterlibatan pemangku kepentingan di dalam keputusan politik dan ekonomi pemerintah. Keterlibatan ini terutama diperlukan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah tentang pengeluaran tertentu, apa yang akan dibelanjakan, strategi untuk meningkatkan pendapatan, serta apa yang harus dikenakan pajak dan retribusi, dimana semua hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung tujuan konservasi.

Kebijakan fiskal publik juga dapat mendorong pengarusutamaan konservasi bagi sektor swasta. Pengeluaran publik dapat berdampak positif pada masalah konservasi lingkungan dan pencegahan perubahan iklim, misalnya ketika pengeluaran publik mendukung isu prioritas seperti pengelolaan daerah aliran sungai dan kawasan hutan, serta infrastruktur tahan iklim. Pengeluaran “negatif” mencakup penganggaran untuk pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang didanai pemerintah atau pembukaan lahan hutan yang dipimpin negara. Kebijakan fiskal positif dapat mencakup insentif untuk teknologi bersih atau perkebunan kehutanan swasta, sementara kebijakan fiskal negatif dapat mencakup keringanan pajak untuk investasi bahan bakar fosil swasta atau bagi investor swasta untuk membuka hutan.

Penyusunan anggaran pembangunan merupakan proses politik dan teknis yang kompleks, namun memberikan banyak titik-masuk untuk pengarusutamaan konservasi di dalam berbagai kegiatan pembangunan. Tahapan utama dalam proses anggaran adalah perencanaan dan perumusan anggaran, pelaksanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pemantauan dan pertanggungjawaban anggaran. Dua sasaran pengarusutamaan konservasi dalam proses penganggaran yaitu anggaran pendapatan dan belanja publik maupun reformasi fiskal lingkungan yang mempengaruhi investasi swasta.

3.2.3 Pengarusutamaan konservasi dalam Proses Perencanaan Sektoral dan Subnasional

Untuk memastikan bahwa isu konservasi lingkungan yang pro-kaum miskin yang dimasukkan ke dalam rencana dan anggaran pembangunan nasional benar-benar diimplementasikan serta berdampak positif bagi masyarakat, diperlukan rencana sektoral dan subnasional serta anggaran untuk mengintegrasikan tujuan konservasi yang sama setiap tahunnya. Struktur pemerintahan dan kelembagaan di tingkat lokal, baik pemerintah lokal maupun organisasi berbasis komunitas, di beberapa negara telah mampu mengintegrasikan proses konservasi maupun mitigasi-adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana dan anggaran subnasional maupun sektor, namun masih banyak tantangan yang harus diatasi dalam pengarusutamaan konservasi untuk penganggaran pembangunan di lokal.

3.2.4 Pengarusutamaan konservasi ke dalam Proses Pemantauan Nasional

Pemantauan dan evaluasi adalah bagian dari proses perencanaan dan penganggaran yang efektif dan merupakan salah satu pintu masuk utama dalam pengarusutamaan konservasi. Jika isu konservasi dimasukkan dalam sistem pemantauan pembangunan nasional, maka akan lebih mudah untuk melacak kemajuan dalam mencapai tujuan, target dan strategi implementasi yang termasuk dalam dokumen kebijakan utama (misalnya rencana pembangunan nasional atau rencana strategis sektoral). Memasukkan isu dan masalah konservasi lingkungan ke dalam sistem pemantauan pembangunan juga membantu menjaga dan meningkatkan pemahaman tentang keterkaitan pembangunan dengan konservasi kehati, serta untuk mengukur kontribusi kehati terhadap pembangunan.

3.2.5 Mengelola Investasi Swasta di Sumber Daya Alam

Selama dua dekade terakhir, arus investasi swasta dan investasi asing (*Foreign Direct investment* - FDI) ke negara-negara berkembang terus meningkat. Investasi tersebut dapat membawa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan bagi negara tujuan investasi, tetapi manfaat tersebut tidak datang secara otomatis. Dampak dari investasi asing akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan kelembagaan dari negara investasi. Peningkatan investasi di sektor primer, termasuk pertanian, kehutanan, perikanan dan industri ekstraktif, menciptakan peluang pertumbuhan baru bagi negara-negara dengan potensi sumber daya alam yang tinggi. Tanpa regulasi konservasi maupun lingkungan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh ekstraksi kehati melalui investasi asing dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber daya alam, yang dapat memperburuk kemiskinan. Negara tujuan investasi memerlukan pendekatan dan kebijakan konservasi-lingkungan strategis untuk mengelola dan menegosiasikan kontrak investasi asing, serta memantau kepatuhan investor

Bab 4.

Keterkaitan Kegiatan Konservasi dan Pembangunan Sosial-Ekonomi

4.1. Keterkaitan kegiatan konservasi di Sulawesi dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia

Bagian ini membahas mengenai keterkaitan antara kegiatan konservasi dengan berbagai pencapaian tujuan pembangunan nasional, dengan menggunakan studi kasus kegiatan konservasi di wilayah Sulawesi. Kontribusi kegiatan konservasi dianalisis melalui pendekatan alokasi anggaran dari sektor KLHK untuk wilayah Sulawesi yang terkait dengan Prioritas Nasional dan Program Prioritas.

Berdasarkan tinjauan mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari direktorat jenderal (dirjen) di KLHK, keenam dirjen di KLHK yang memiliki tupoksi konservasi secara langsung adalah:

1. Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL);

Tugas dan fungsi Ditjen PDASHL yakni terkait dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; koordinasi dan sinkronisasi kebijakan; bimbingan teknis dan supervisi; serta monitoring dan evaluasi di bidang peningkatan daya dukung DAS dan hutan lindung.

2. Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

Ditjen KSDAE memiliki tupoksi utama dalam penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistem. Lebih spesifik kewenangan KSDAE yakni terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, termasuk penyusunan norma dan standar, fungsi koordinasi, pelaksanaan bimbingan teknis, serta fungsi administrasi.

3. Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan (PKTL)

Ditjen PKTL memiliki tupoksi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan NSPK, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis serta melakukan monitoring dan evaluasi khususnya di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan (SDH), rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat SDH dan kajian lingkungan hidup strategis serta kajian dampak lingkungan dalam rangka pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

4. Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL)

Ditjen PSKL memiliki tupoksi utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup khususnya bidang kehutanan, penanganan tenurial dan hutan adat, serta melaksanakan komunikasi publik dan kemitraan lingkungan dengan berbagai stakeholder terkait.

5. Ditjen Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P2SDM)

Ditjen P2SDM merupakan unsur pendukung pada KLHK yang berperan dalam peningkatan dan pengembangan SDM baik aparatur maupun masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, penyuluhan kehutanan, perencanaan dan standarisasi, dalam rangka mewujudkan generasi lingkungan.

6. Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Direktorat Jendral PHPL memiliki tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi dengan mengedepankan asas kebermanfaatan, keadilan, keterbukaan, dan kelestarian untuk kesejahteraan masyarakat. Termasuk di dalamnya, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pembinaan kesatuan pengelolaan hutan produksi serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan tersebut.

Beberapa kegiatan konservasi yang dilakukan KLHK yang bersinggungan dengan pembangunan sosial-ekonomi antara lain Perhutanan Sosial, Tanah Objek Reformasi Agraria, pengembangan ekowisata, agroforestri, pemanfaatan jasa lingkungan untuk penyediaan air bersih dan energi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, restorasi dan rehabilitasi ekosistem, dan lain-lain. Berbagai kegiatan tersebut, meskipun dilaksanakan dalam rangka melakukan konservasi kehati, memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan sosial-ekonomi masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut juga dilakukan oleh KLHK di berbagai provinsi di Sulawesi. Tabel 2 merangkum jumlah anggaran yang dialokasikan oleh KLHK untuk kegiatan konservasi kehati di tiap provinsi di Sulawesi.

Tabel 2: Anggaran Ditjen KLHK per Provinsi di Sulawesi per tahun 2019 & 2020 bagian dari PN (000 Rupiah)*

Tahun		Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat	Total
2019	000 Rp	39.696.737	49.411.378	332.648.656	39.278.519	171.229.488	36.933.411	669.198.189
	%	6%	7%	50%	6%	26%	6%	
2020	000 Rp	36.673.411	31.374.714	158.279.876	51.946.919	51.051.189	23.270.919	352.597.028
	%	10%	9%	45%	15%	14%	7%	
Total	000 Rp	76.370.148	80.786.092	490.928.532	91.225.438	222.280.677	60.204.330	1.021.795.217

* Hanya anggaran yang terhubung dengan Prioritas Nasional (PN), di luar anggaran belanja operasional, administrasi dan kesekretariatan

Berdasarkan hasil analisis Data KRISNA untuk keenam Ditjen terkait konservasi kehati di KLHK, lima Ditjen memberikan lokus penanda Sulawesi pada anggarannya, sementara satu Ditjen, yaitu Ditjen PHPL, tidak memberikan lokus penanda provinsi, sehingga data anggaran dari Ditjen PHPL tidak dapat diolah lebih lanjut ke dalam analisis di kajian ini.

Tabel 2 menghimpun total anggaran rencana kerja dari Kelima Direktorat Jenderal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dialokasikan untuk wilayah Sulawesi dan berkontribusi terhadap Prioritas Nasional (PN) pada tahun 2019 dan 2020. Jumlah anggaran yang terangkum di Tabel 2 tidak memasukkan komponen biaya pendukung kegiatan, seperti biaya yang diperlukan dalam menjalankan administrasi, kegiatan operasional kantor, maupun kesekretariatan.

Dari semua provinsi di Sulawesi, Sulawesi Selatan mendapat alokasi anggaran tertinggi dari kelima Ditjen KLHK terkait kegiatan konservasi, yaitu sebesar 50% (Rp332,6 miliar) pada tahun 2019 dan 45% (Rp158,2 miliar) pada tahun 2020. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat mendapatkan anggaran terkecil dibanding provinsi lain di Sulawesi, yang hanya berkisar 6-7% dari anggaran tahunan pada tahun 2019 dan 2020. Alokasi anggaran yang banyak diberikan ke Provinsi Sulawesi Selatan antara lain disebabkan karena dua Ditjen, yaitu Ditjen P2SDM (Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan Ditjen PSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan), masing-masing memiliki sebuah kantor balai di Sulawesi Selatan dengan ruang lingkup tugas yang meliputi seluruh Wilayah Sulawesi. Dua Ditjen tersebut menandai lokus provinsi Sulawesi Selatan pada Renja mereka, karena kantor regional Sulawesi untuk UPT PSKL dan P2SDM terletak di Sulawesi Selatan. Namun, anggaran konservasi yang dialokasikan bagi dua kantor UPT di Sulawesi Selatan tersebut diperuntukkan untuk kegiatan di seluruh wilayah Sulawesi. Secara keseluruhan, Sulawesi Selatan memiliki jumlah kantor Balai KLHK yang lebih banyak dibanding provinsi lain yang ada di Sulawesi, yaitu sebanyak 6 kantor balai (Tabel 3). Secara umum, total anggaran dari lima Ditjen di KLHK untuk setiap provinsi di Sulawesi cenderung menurun dari tahun 2019 ke 2020, kecuali anggaran di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengalami kenaikan dari Rp39 miliar menjadi Rp51 miliar di tahun 2020.

Tabel 3: Gambaran kawasan konservasi di berbagai provinsi di Sulawesi

Lokasi	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Taman Nasional	1. Bunaken (89.069 ha)	1. Lore Lindu (215.733 ha) 2. Togean (365.241 ha)	1. Taka Bone Rate (530.765 ha) 2. Bantimurung-Bulusaurung (43.750 ha)	1. Wakatobi (1.390.000 ha) 2. Rawa Aopa Watumohai (105.194 ha)	1. Bogani Nani Wartabone (282.008 ha)	1. Gandang Dewata
Kawasan Konservasi Non-TN	Cagar Alam (23.052,80 ha) 1. Gunung Dua Samudra 2. Gunung Lokon 3. Gunung Ambang Suaka Margasatwa (35.047,15 ha) 4. Karakelang 5. Gunung Manembo-nembo Tahura (208,91 ha) 6. Gunung Tumpa H.V. Worang Taman Wisata Alam (3.900,19 ha) 7. Batu Putih 8. Batu Angus 9. Gunung Ambang Kawasan Konservasi perairan 10. Kabupaten Minahasa Utara 11. Kabupaten Minahasa Selatan 12. Kota Bitung	Cagar Alam (374.659,84 ha) 1. Gunung Sojol 2. Gunung Tinomba 3. Pangi Binangga 4. Morowali 5. Gunung Dako 6. Pamona Suaka Margasatwa (21.312,34 ha) 7. Bakiriang 8. Tanjung Santigi 9. Pulau Pasoso 10. Wera 11. Bancea 12. Pulau Tokobae Taman Buru (4.053,20 ha) 13. Landusa Tomata	Cagar Alam (91.235,09 ha) 1. Ponda-ponda 2. Kalaena Suaka Margasatwa (4.029.49 ha) 3. Komara Tahura (4.260,98 ha) 4. Abdul Latief/Sinjai Taman Buru (2.725.33 ha) 5. Komara Taman Wisata Alam (97.827.76 ha) 6. Cani Sirenreng 7. Lejja 8. Danau Matano 9. Danau Mahalona Taman Wisata Perairan (50.000 ha) 10. Kapoposang Kawasan Konservasi perairan 11. Kabupaten Luwu Utara 12. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Cagar Alam (1.474,45 ha) 1. Lamedai 2. Kakinauwe 3. Napabalano Suaka Margasatwa (163.924.67 ha) 4. Tanjung Peropa 5. Tanjung Batikolo 6. Tanjung Amolengo 7. Buton Utara 8. Labusango Tahura (7.892.78 ha) Taman Wisata Alam (113.522,21 ha) 9. THR Murhum/Nipa-nipa 10. Mangolo 11. Tirta Rimba/Air Jatuh 12. Teluk Laloso 13. Kepulauan Padamarang	Cagar Alam (39.984,68 ha) 1. Panua 2. Tanjung Panjang 3. Mas Popaya Raja Suaka Margasatwa (51.710 ha) 4. Nantu	KSA/KSP 988,35 ha

Lokasi	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
			13. Kabupaten Kepulauan Selayar Pulo Kauna 14. Kabupaten Kepulauan Selayar Pulo Pasi Gusung			
Kantor Balai perwakilan KLHK	BPDASHL Tondano; Balai KSDA Sulawesi Utara; Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI Manado	BPDAS Palu Poso, Balai KSDA Sulawesi Tengah; Balai Pemantapan Kawasan hutan Wilayah XVI Palu, Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XII (Palu)	BPDAS Jebeberang Saddang; Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan; Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar; Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Sulawesi; Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM LHK wilayah Sulawesi; Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII (Makasar)	BPDAS Sampara; Balai KSDA Sulawesi Tenggara; Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari	BPDAS Bone Bolango; Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo	BPDAS Lariang Mamasa

Tabel 3 memberikan ilustrasi mengenai kawasan konservasi yang berlokasi di tiap provinsi di Sulawesi. Jumlah Taman Nasional di tiap provinsi di Sulawesi berkisar antara 1-2 Taman Nasional. Area Taman Nasional terluas di Sulawesi berada di Sulawesi Tenggara, yaitu di Taman Nasional Wakatobi seluas 1.3 juta hektar, diikuti TN Taka Bone Rate di Sulawesi Selatan seluas 530 ribu hektar dan Togean di Sulawesi Tengah. Ketiga taman nasional tersebut merupakan Taman Nasional yang wilayahnya didominasi wilayah perairan dan kepulauan. TN di Sulawesi yang luas wilayahnya didominasi ekosistem daratan adalah TN Rawa Aopa Watumoha di Sulawesi Tenggara dan TN Lore Lindu di Sulawesi Tengah.

Setiap Provinsi memiliki Kantor Balai Pengelolaan DAS sebagai perwakilan KLHK di setiap Provinsi di Sulawesi. Kantor Balai lainnya antara lain Balai Pendidikan dan Pelatihan SDM Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kantor Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Sulawesi yang terdapat di Sulawesi Selatan.

Tabel 4: Alokasi Anggaran Per Kegiatan KLHK di Sulawesi tahun 2019-2020 (000 Rupiah)

Kegiatan	2019		2020		Total
	000 Rupiah	%	000 Rupiah	%	000 Rupiah
5404-Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air	-	0,00%	238.795.981	67,72%	238.795.981
5406-Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	-	0,00%	288.100	0,08%	288.100
5409-Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Rehabilitasi Lahan. Perencanaan DAS. serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	505.306.443	75,51%	-	0,00%	505.306.443
5410-Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan	9.591.894	1,43%	-	0,00%	9.591.894
5414-Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	5.500.000	0,82%	2.919.897	0,83%	8.419.897
5415-Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat	11.395.170	1,70%	8.036.595	2,28%	19.431.765
5416-Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat	8.942.322	1,34%	3.701.950	1,05%	12.644.272
5417-Penanganan Konflik. Tenurial. dan Hutan Adat	2.207.000	0,33%	839.760	0,24%	3.046.760
5421-Pengelolaan Kawasan Konservasi	-	0,00%	37.366.129	10,60%	37.366.129
5422-Konservasi Spesies dan Genetik	-	0,00%	6.728.035	1,91%	6.728.035
5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	-	0,00%	26.210.435	7,43%	26.210.435
5424-Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	-	0,00%	572.870	0,16%	572.870
5425-Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	24.331.976	3,64%	-	0,00%	24.331.976
5426-Pengelolaan Taman Nasional	48.895.207	7,31%	-	0,00%	48.895.207
5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	-	0,00%	14.856.561	4,21%	14.856.561
5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	-	0,00%	2.252.798	0,64%	2.252.798

Kegiatan	2019		2020		Total
	000 Rupiah	%	000 Rupiah	%	000 Rupiah
5435-Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	-	0,00%	2.169.917	0,62%	2.169.917
5438-Pemantapan Kawasan Hutan	39.851.857	5,96%	-	0,00%	39.851.857
5442-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	12.936.320	1,93%	7.498.000	2,13%	20.434.320
5443-Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	240.000	0,04%	360.000	0,10%	600.000
Total	669.198.189	100	352.597.028	100	1.021.795.217

Tabel 4 memuat rincian kegiatan dari lima Direktorat Jenderal KLHK di Sulawesi yang memiliki tagging terkait Prioritas Nasional (PN) dan dijabarkan di dalam Rencana Kerja tahunan (Renja K/L). Secara umum, total anggaran konservasi kehati KLHK untuk Sulawesi mengalami penurunan dari Rp669 miliar (sekitar USD48,8 juta pada kurs Rp13.500) pada tahun 2019 menjadi Rp352 miliar (USD26 juta). Secara nasional, pada tahun 2019 pemerintah mengalokasikan program rehabilitasi lahan dan penanaman (RHL) dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), sehingga terdapat penambahan alokasi anggaran bagi KLHK untuk mendukung program tersebut di tahun 2019. Dana terkait program RHL di tahun 2019 (Kegiatan 5406 dan 5409 terkait penanaman dan perbenihan) turun sekitar Rp276 miliar di tahun 2020 (Kegiatan 5404 dan 5406 terkait pembinaan dan pemeliharaan). Turunnya alokasi anggaran RHL pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 disebabkan oleh perubahan volume target RHL sehingga anggaran pada tahun 2020 lebih difokuskan pada pemeliharaan tanaman hasil penanaman tahun 2019 (T+1). Hal ini menjelaskan perbedaan jumlah total alokasi anggaran pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang cukup signifikan, termasuk perbedaan total alokasi anggaran sebesar sebesar Rp317 miliar di Sulawesi antara tahun 2019 dan 2020.

Sesuai dengan prioritas kegiatan konservasi di tahun 2019 yang berfokus pada rehabilitasi dan restorasi, kegiatan KLHK di Sulawesi di tahun 2019 sebagian besar difokuskan pada Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (5409) dan didukung kegiatan Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (5410) sebagai kegiatan pendukung.

- Sekitar 75% anggaran tiga direktorat KLHK di Sulawesi pada tahun 2019 dialokasikan untuk Penyelenggaraan Rehabilitasi (Rp505 miliar) dan 1% (Rp1 miliar) anggaran untuk kegiatan Penyelenggaraan Perbenihan.
- Kegiatan lain yang menjadi fokus KLHK pada 2019 adalah kegiatan terkait Pengelolaan Taman Nasional (kegiatan 5426) dan Pemantapan Kawasan Hutan (kegiatan 5438), masing-masing mendapatkan alokasi anggaran sebesar 7,3% dan 5,9% dari total anggaran tahun 2019.
- Kegiatan terkait perhutanan sosial, kemitraan, dan penyelesaian konflik dengan masyarakat (kegiatan 5414, 5415, 5416, dan 5417) yang sebagian kegiatannya terkait dengan pengentasan kemiskinan di Sulawesi mendapat alokasi dana sekitar 4,1% (Rp28 miliar) dari total anggaran pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 kegiatan tiga direktorat KLHK di Sulawesi difokuskan pada Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air (kegiatan 5404). Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan 5409 terkait rehabilitasi dan reklamasi yang menjadi kegiatan utama tahun 2019.

- 67,7% anggaran dari lima Ditjen KLHK untuk kegiatan konservasi kehati di Sulawesi pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp238 Miliar, dialokasikan pada kegiatan Pembinaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Konservasi Tanah dan Air. Kegiatan ini merupakan kelanjutan kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Restorasi yang telah dilaksanakan di tahun 2019.
- Fokus kegiatan lainnya pada tahun 2020 adalah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, yang meliputi Taman Nasional dan Kawasan Hutan (5421) yang antara lain didukung dengan kegiatan konservasi spesies dan genetic (5422). Dua kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp44 Miliar atau sekitar 12,5% dari anggaran KLHK untuk wilayah Sulawesi pada tahun 2020.
- Di tahun 2020, kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi (5423) diberikan tagging Prioritas Nasional yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain melalui ekowisata serta jasa lingkungan air, energy dan karbon. Kegiatan terkait jasa lingkungan tersebut mendapat alokasi anggaran sebesar Rp26 miliar atau 7,4% dari total anggaran kelima Ditjen KLHK untuk wilayah Sulawesi pada tahun 2020. Sedangkan alokasi anggaran kegiatan KLHK terkait perhutanan sosial, kemitraan, dan penyelesaian konflik dengan masyarakat (kegiatan 5414, 5415, 5416, dan 5417) mendapat alokasi dana sekitar 4,4% (Rp15,4 miliar) dari total anggaran pada tahun 2020, dimana persentase tersebut tidak jauh berbeda dengan proporsi anggaran di tahun sebelumnya.

Tabel 5: Anggaran Output KLHK terkait dengan Prioritas Nasional di Sulawesi 2019-2020 (000 Rupiah)

Prioritas Nasional dan Output Renja K/L	Tahun				Total 000 Rupiah
	2019 000 Rupiah	%	2020 000 Rupiah	%	
PN 01- Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	92.036.399	13,75%	30.354.763	8,61%	122.391.162
001-Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	3.595.170	0,54%	-	0,00%	3.595.170
001-Jumlah Komunitas Kemitraan Lingkungan	120.000	0,02%	-	0,00%	120.000
001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan	-	0,00%	522.350	0,15%	522.350
001-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang terbentuk	-	0,00%	920.400	0,26%	920.400
001-Luas Hutan Yang Dikelola Masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan	5.500.000	0,82%	-	0,00%	5.500.000
001-Mitra Perhutanan Sosial yang diberdayakan	-	0,00%	267.000	0,08%	267.000
001-Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat	1.143.942	0,17%	-	0,00%	1.143.942
001-Penanganan Konflik dan Tenurial	357.000	0,05%	-	0,00%	357.000
002-Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	-	0,00%	5.291.195	1,50%	5.291.195
002-Jumlah fasilitasi peningkatan produksi hasil hutan dan jasa lingkungan	7.800.000	1,17%	-	0,00%	7.800.000
002-Jumlah generasi muda Lingkungan Hidup yang meningkatnya kapasitasnya	240.000	0,04%	-	0,00%	240.000
002-Penyediaan Pendamping Dalam Pengembangan Perhutanan Sosial	8.822.322	1,32%	-	0,00%	8.822.322

Prioritas Nasional dan Output Renja K/L	Tahun				Total 000 Rupiah
	2019 000 Rupiah	%	2020 000 Rupiah	%	
002-Penyelenggaraan Verifikasi Hutan Adat	1.850.000	0,28%	-	0,00%	1.850.000
002-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	-	0,00%	3.434.950	0,97%	3.434.950
003-Hutan Adat yang ditetapkan	-	0,00%	317.410	0,09%	317.410
003-Luas penyiapan Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS	-	0,00%	2.919.897	0,83%	2.919.897
005-Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	11.991.184	1,79%	-	0,00%	11.991.184
005-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dikembangkan		0,00%	1.825.000	0,52%	1.825.000
006-Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	22.422.223	3,35%	5.876.754	1,67%	28.298.977
007-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	-	0,00%	8.979.807	2,55%	8.979.807
007-Penyiapan prakondisi dan pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat melalui kemitraan konservasi	2.943.660	0,44%	-	0,00%	2.943.660
008-Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan konservasi (Bina Daerah Penyangga)	1.703.748	0,25%	-	0,00%	1.703.748
010-Penyiapan prakondisi dan pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat melalui kemitraan konservasi	1.966.000	0,29%	-	0,00%	1.966.000
031-Pengamanan Kolaboratif KPH Bersama Masyarakat	18.196.150	2,72%	-	0,00%	18.196.150
033-Intervensi metode agroengineering di daerah buffer TN Lore Lindu	600.000	0,09%	-	0,00%	600.000
034-Kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi	2.070.000	0,31%	-	0,00%	2.070.000
041-Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan konservasi (Bina Daerah Penyangga)	715.000	0,11%	-	0,00%	715.000
PN 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja		0,00%	32.291.424	9,16%	32.291.424
001-Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	-	0,00%	5.446.597	1,54%	5.446.597
001-Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	-	0,00%	7.498.000	2,13%	7.498.000
004-Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN	-	0,00%	19.346.827	5,49%	19.346.827
PN 03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui	56.766.329	8,48%		0,00%	56.766.329

Prioritas Nasional dan Output Renja K/L	Tahun				Total
	2019		2020		
	000 Rupiah	%	000 Rupiah	%	000 Rupiah
Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya					
001-Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	12.936.320	1,93%	-	0,00%	12.936.320
002-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	2.816.529	0,42%	-	0,00%	2.816.529
003-Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	2.621.921	0,39%	-	0,00%	2.621.921
015-Jumlah Nilai PNBPN dari Pemanfaatan TSL	180.000	0,03%	-	0,00%	180.000
016-Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah	1.941.350	0,29%	-	0,00%	1.941.350
021-Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi	14.443.280	2,16%	-	0,00%	14.443.280
022-Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah	1.547.000	0,23%	-	0,00%	1.547.000
027-Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi	7.609.000	1,14%	-	0,00%	7.609.000
039-Sarana Prasarana Ekowisata Taman Nasional Model SBSN	10.967.815	1,64%	-	0,00%	10.967.815
040-Operasional Penyelamatan TSL (WRU) berbasis masyarakat	500.000	0,07%	-	0,00%	500.000
041-Pengembangan ekowisata pada Kawasan Konservasi yang mendukung 7 Destinasi Wisata Prioritas dan 2 KEK Pariwisata	1.203.114	0,18%	-	0,00%	1.203.114
PN 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup		0,00%	289.950.841	82,23%	289.950.841
001-Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya	-	0,00%	14.495.540	4,11%	14.495.540
001-Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	-	0,00%	7.002.905	1,99%	7.002.905
001-SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari	-	0,00%	360.000	0,10%	360.000
002-Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	-	0,00%	6.878.586	1,95%	6.878.586
002-Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	-	0,00%	1.417.011	0,40%	1.417.011
002-Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	-	0,00%	298.000	0,08%	298.000
002-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Vegetatif	-	0,00%	229.469.960	65,08%	229.469.960
003-Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	-	0,00%	15.992.003	4,54%	15.992.003

Prioritas Nasional dan Output Renja K/L	Tahun				Total
	2019		2020		
	000 Rupiah	%	000 Rupiah	%	000 Rupiah
003-Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	-	0,00%	288.100	0,08%	288.100
003-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil Teknis	-	0,00%	4.657.103	1,32%	4.657.103
004-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	-	0,00%	2.252.798	0,64%	2.252.798
006-Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai	-	0,00%	4.668.918	1,32%	4.668.918
012-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH	-	0,00%	2.169.917	0,62%	2.169.917
PN 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	520.395.461	77,76%		0,00%	520.395.461
001-Penyediaan Benih Berkualitas dan Materi Genetik Unggul	4.341.894	0,65%	-	0,00%	4.341.894
002-Penyediaan Bibit Berkualitas	5.250.000	0,78%	-	0,00%	5.250.000
002-Rehabilitasi Hutan Mangrove	4.453.836	0,67%	-	0,00%	4.453.836
003-Data Kinerja DAS	2.470.000	0,37%	-	0,00%	2.470.000
009-Perlindungan dan Pengamanan berbasis Resort bersama Masyarakat untuk perlindungan kawasan dan sumber air	10.331.096	1,54%	-	0,00%	10.331.096
011-Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air	4.306.472	0,64%	-	0,00%	4.306.472
011-Perlindungan dan Pengamanan berbasis Resort bersama Masyarakat untuk perlindungan kawasan dan sumber air	5.197.118	0,78%	-	0,00%	5.197.118
012-Penyediaan Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	19.120.000	2,86%	-	0,00%	19.120.000
013-Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air	3.258.588	0,49%	-	0,00%	3.258.588
017-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	451.043.797	67,40%	-	0,00%	451.043.797
018-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil Teknis	6.895.500	1,03%	-	0,00%	6.895.500
019-Internalisasi RPDAS dalam RTRW	800.000	0,12%	-	0,00%	800.000
020-Penyediaan Sarana Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	2.327.160	0,35%	-	0,00%	2.327.160
022-Energi listrik yang dihasilkan dari Mini/Mikro Hidro di sekitar dan di dalam Kawasan Konservasi	300.000	0,04%	-	0,00%	300.000
029-Energi listrik yang dihasilkan dari Mini/Mikro Hidro di sekitar dan di dalam Kawasan Konservasi	300.000	0,04%	-	0,00%	300.000
Total (PN 01+PN03+PN 04)	669.198.189	100	352.597.028	100	1.021.795.217

Tabel 5 memuat anggaran dari keluaran/*output* di dalam Rencana Kerja KLHK yang terkait dengan Prioritas Nasional pada tahun 2019 dan 2020. Prioritas Nasional (PN) merupakan agenda prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia di dalam dokumen rencana tahunan, atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sedangkan output merupakan output dari berbagai kegiatan KLHK yang tercantum di dalam Rencana Kerja tahunan KLHK.

Pada tahun 2019 dan 2020, mayoritas kegiatan dari ketiga Ditjen KLHK yang terkait dengan aspek konservasi dan pengembangan sosio-ekonomi di Sulawesi merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) Ketahanan Pangan, Energi, dan Sumber Daya Air (PN 04). Anggaran untuk kegiatan terkait PN 04 adalah sebesar 77,7% (Rp 520,3 miliar) dari total anggaran tahun 2019 dan 82,2% (Rp289,5 miliar) dari total anggaran KLHK di Sulawesi pada tahun 2020.

- Pada tahun 2019, output kegiatan terbesar dari KLHK terkait PN 04 adalah Output 017 mengenai rehabilitasi secara vegetatif, yaitu sebesar Rp451 miliar atau 67,4% dari keseluruhan anggaran kelima Ditjen KLHK terkait konservasi kehati di Sulawesi. Output 017 merupakan output terkait dengan program restorasi dan rehabilitasi lahan yang menjadi fokus utama pembangunan pada tahun 2019.
- Proporsi alokasi anggaran serupa masih dipertahankan pada tahun 2020 untuk output rehabilitasi vegetatif (Output 002-Rehabilitasi vegetatif), meskipun jumlahnya sedikit menurun menjadi Rp229 miliar atau sekitar 65% dari total anggaran KLHK untuk Sulawesi pada tahun 2020.

Kegiatan KLHK di Sulawesi yang mendukung Prioritas Nasional dalam Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar (PN 01) mendapatkan alokasi anggaran terkecil, dengan penurunan alokasi sebesar Rp62 miliar, yaitu dari Rp92 miliar (sekitar 13,7% dari total alokasi anggaran) pada tahun 2019 menjadi Rp 30,3 miliar (sekitar 8,6% dari total alokasi anggaran) pada tahun 2020.

- Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan yang dapat mendukung Prioritas Nasional 01 dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pelayanan Dasar dapat dimaklumi, mengingat pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial-ekonomi merupakan tupoksi yang cenderung kurang dikuasai oleh para staf lapangan di UPT Balai KLHK.
- Pada tahun 2019, anggaran KLHK terkait PN 01 mengenai Pengentasan Kemiskinan sebagian besar dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) di dalam *Output* 005 mengenai Dokumen Tata Batas Kawasan Hutan dan *Output* 006 mengenai Inventarisasi dan Verifikasi obyek TORA dalam Kawasan Hutan, dengan total anggaran sebesar Rp34 miliar atau 5,1% dari total anggaran KLHK di Sulawesi di 2019. Alokasi anggaran terbesar kedua terkait PN 01 adalah untuk pencapaian *Output* 031 mengenai Pengamanan KPH secara Kolaboratif dengan melibatkan masyarakat, yaitu sebesar Rp18,1 miliar atau 2,7% dari anggaran tahun 2019.
- Pada tahun 2020, sebagian anggaran terkait PN 01 di Sulawesi dialokasikan untuk mendukung output KLHK terkait TORA (*Output* 006 dan *Output* 007), dengan total Rp14,8 miliar atau 4,2% dari keseluruhan anggaran. Sedangkan sisa anggaran terkait PN 01 di tahun 2020 dialokasikan untuk mendukung pencapaian output dari KLHK terkait Perhutanan Sosial dan Kemitraan bersama masyarakat (mis. *Output* 001 mengenai Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, *Output* 002 Fasilitasi Nilai Tambah Jasa Lingkungan, dan *Output* 005 Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial).

Tabel 6: Anggaran konservasi kehati KLHK untuk Sulawesi terkait Prioritas Nasional dan Program Prioritas tahun 2019 dan 2020 (000 Rupiah)

Prioritas Nasional (PN) / Program Prioritas (PP)	Tahun				Total 000 Rp
	2019 000 Rupiah	%	2020 000 Rupiah	%	
PN 01-Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	92.036.399	13,75%	30.354.763	8,61%	122.391.162
01-Percepatan Pengurangan Kemiskinan	91.436.399	13,66%	-	0,00%	91.436.399
02-Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	600.000	0,09%	-	0,00%	600.000
04-Pengentasan Kemiskinan	-	0,00%	30.354.763	8,61%	30.354.763
PN 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	-	0,00%	32.291.424	9,16%	32.291.424
02-Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	-	0,00%	24.793.424	7,03%	24.793.424
03-Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja		0,00%	7.498.000	2,13%	7.498.000
PN 03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	56.766.329	8,48%	-	0,00%	56.766.329
01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	9.606.800	1,44%	-	0,00%	9.606.800
03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	34.223.209	5,11%	-	0,00%	34.223.209
04-Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	12.936.320	1,93%	-	0,00%	12.936.320
PN 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	-	0,00%	289.950.841	82,23%	289.950.841
02-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	-	0,00%	278.193.888	78,90%	278.193.888
04-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-	0,00%	11.756.953	3,33%	11.756.953
PN 04-Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	520.395.461	77,76%	-	0,00%	520.395.461
01-Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	600.000	0,09%	-	0,00%	600.000
03-Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	519.795.461	77,67%	-	0,00%	519.795.461
Total (PN 01+PN 03+PN 04)	669.198.189	100	352.597.028	100	1.021.795.217

Tabel 6 menjabarkan alokasi anggaran Ditjen KLHK terkait konservasi kehati di Sulawesi yang berkaitan dengan Prioritas Nasional dan Program Prioritas di tahun 2019 dan 2020. Program Prioritas (PP) merupakan lingkup program utama yang diarahkan untuk membantu pencapaian Prioritas Nasional (PN). Secara umum, PN pada tahun 2019 dan 2020 yang pencapaiannya dapat didukung oleh kegiatan konservasi antara lain meliputi mengenai Pengentasan Kemiskinan dan Pelayanan Dasar (PN 01), Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Lapangan Kerja (PN 03), dan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air (PN 04). Masing-masing PN kemudian dijabarkan lagi menjadi berbagai Program Prioritas (PP).

Pada tahun 2019, jumlah alokasi anggaran KLHK yang terkait dengan PP Pengentasan Kemiskinan (PP 01) sebesar 13,7% dari total anggaran atau sebesar Rp92 miliar. Alokasi anggaran kemudian menurun pada tahun 2020, yaitu menjadi sebesar Rp30,3 miliar atau sebesar 8,6% dari alokasi anggaran KLHK untuk Sulawesi.

Secara umum, mayoritas alokasi anggaran dari kelima direktorat KLHK di Sulawesi pada tahun 2019 dan 2020 difokuskan pada Prioritas Nasional 04 terkait Ketahanan Pangan, Energi dan Air, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air (PP 03 pada tahun 2019 dan PP 02 pada tahun 2020). Pada tahun 2019, alokasi anggaran yang berkaitan dengan Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Air (PP 03) adalah sebesar Rp519 miliar atau 77,6% dari total anggaran 2019 di Sulawesi. Pada tahun 2020, alokasi anggaran tiga Ditjen KLHK di Sulawesi juga sangat terkait dengan Program Prioritas terkait Sumber Daya Air (PP 02), yaitu sebesar 78,9% atau Rp 278,9 miliar.

Program Prioritas lain yang juga mendapatkan dukungan dari kegiatan ketiga direktorat KLHK di Sulawesi pada tahun 2019 dan 2020 adalah PP terkait Peningkatan Nilai Tambah dari sektor Riil, yaitu sektor Pariwisata. Pada tahun 2019 dan 2020, 8-9% anggaran tahunan dialokasikan untuk mendukung Prioritas Nasional untuk Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi dan Lapangan Kerja (PN 03). Sebagian besar anggaran di PN 03 dialokasikan bagi kegiatan terkait peningkatan Nilai Tambah Ekonomi di sekitar kawasan konservasi, yaitu di PP 03 sebesar 5,1% pada tahun 2019, dan PP 02 sebesar 7% di tahun 2020, melalui pemanfaatan jasa lingkungan serta pengembangan wisata alam dan ekowisata.

4.2. Kontribusi kegiatan konservasi Taman Nasional untuk pembangunan sosial ekonomi

Bagian ini mengilustrasikan bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Taman Nasional bersinggungan secara langsung dengan upaya pemberdayaan masyarakat serta pengentasan kemiskinan. Secara umum bagian ini akan membahas mengenai kebijakan, kegiatan, dampak, serta pendanaan yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap para pemangku kebijakan di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dan Balai Besar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.

Dari sisi kebijakan, Undang Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan tiga pilar utama kegiatan konservasi yang meliputi: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kehati secara lestari. Tiga pilar tersebut pada awalnya dipahami hanya sebagai domain pemerintah, dimana pendekatan yang dilakukan lebih banyak berorientasi pada aspek perlindungan dan pengawetan serta pelaksanaannya dilakukan secara terpisah dari masyarakat sekitar kawasan konservasi. Dalam perkembangannya, pengelolaan kawasan konservasi terkini dirasa semakin membutuhkan keterlibatan dan peran serta masyarakat sekitar untuk merespon berbagai isu pengelolaan kawasan di tingkat tapak serta mendukung pencapaian ketiga pilar tersebut.

Di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 7 tahun 2016, aspek kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi dijabarkan kembali menjadi beberapa fungsi yang memerlukan keterlibatan masyarakat, antara lain fungsi kerjasama dan kemitraan, fungsi bina cinta alam dan penyuluhan konservasi, serta fungsi pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan. Berbagai fungsi tersebut merupakan keniscayaan dikarenakan wilayah Taman Nasional bersinggungan langsung dengan masyarakat. Bila kita meninjau dari sisi luas kawasan, jumlah desa maupun jumlah penduduk yang tinggal dan beraktivitas di sekitar area studi kasus (Tabel 7), maka Taman Nasional tentunya memerlukan kolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk mendukung keberhasilan pengelolaan kawasan. Berbagai kebijakan maupun program yang dilakukan di kawasan konservasi wilayah Sulawesi, *antara lain Perhutanan Sosial, Kemitraan Konservasi Masyarakat (KKM) proyek EPASS dan Forest Programme III*, juga turut berupaya mengarusutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai komponen utamanya.

Tabel 7: Jumlah Desa Penyangga di Kawasan Taman Nasional

Taman Nasional	Luas Taman Nasional	Desa Penyangga		Pemberdayaan Masyarakat (Kemitraan dan Kerjasama)	
		Jumlah Desa	Estimasi jumlah Penduduk (orang)	Jumlah target	Sumber Dana
Lore Lindu	215.700 hektar	82 Desa	± 90 ribu jiwa (2017)	78 Desa	APBN; Program EPASS, Forest-Programme III
Bogani Nani Wartabone	282.000 hektar	143 Desa	± 95 ribu jiwa (2019)	87 Desa	APBN; Program EPASS

Sumber: TN Lore Lindu dan TN Bogani Nani Wartabone

Secara umum kegiatan yang dilakukan kedua Taman Nasional tersebut dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat adalah dengan memfasilitasi masyarakat untuk memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), memberikan bantuan sarana produksi untuk kegiatan ekonomi, serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan jasa lingkungan sebagai mata pencaharian melalui kegiatan ekowisata. Taman Nasional juga memberikan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan jasa lingkungan dari kawasan Taman Nasional untuk keperluan non-komersil, seperti melalui fasilitasi pemanfaatan sumber air bersih non-komersil dan bantuan pembangkit listrik mikrohidro untuk desa yang belum terjangkau sarana listrik. Fasilitasi dan bantuan yang diberikan oleh Taman Nasional Lore Lindu dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone tentunya telah melewati proses identifikasi dan penilaian potensi dan kebutuhan di tingkat desa.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang cukup baru dilakukan di kedua Taman Nasional studi kasus, sehingga dampak ekonomi langsung dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Taman Nasional belum dapat diukur secara kuantitatif. Beberapa kegiatan pemberdayaan ekonomi, *terutama dari pengembangan ekowisata dan pemanfaatan produk-produk HHBK*, menunjukkan prospek yang menjanjikan namun masih memerlukan dukungan lebih lanjut dari para pihak untuk mendorong keberhasilannya. Dalam jangka panjang, kegiatan pemanfaatan HHBK seperti gula aren, kemiri, coklat, dan kopi, serta keterlibatan masyarakat dalam ekowisata diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang bagi melalui efek pengali (*multiplier effect*) kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi tekanan dari kegiatan masyarakat terhadap kawasan Taman Nasional.

Dua dukungan utama yang diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi adalah dalam penguatan kapasitas masyarakat serta penguatan rantai pasar. Faktor internal seperti keterbatasan wewenang dan sumber daya dari Taman Nasional dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi, dan faktor eksternal seperti kapasitas dan komitmen

masyarakat yang didampingi, juga sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan terkait. Untuk itu diperlukan kolaborasi lintas sektor bersama pemerintah daerah, antara lain dengan sektor pertanian dan pariwisata, untuk memastikan keberlanjutan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi Taman Nasional. Koordinasi dengan para pihak, terutama dengan pemerintah daerah, untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi telah dilakukan oleh Taman Nasional Lore Lindu dan Bogani Nani Wartabone. Namun, pada tahapan implementasi koordinasi Taman Nasional dengan pemerintah daerah maupun para pihak untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan masih perlu dioptimalkan menjadi kolaborasi yang lebih sinergis.

Pemberdayaan melalui kolaborasi, kerjasama, dan kemitraan dengan masyarakat merupakan strategi untuk memperkuat pengelolaan kawasan di tingkat tapak. Dari sisi Taman Nasional, penguatan ekonomi masyarakat merupakan salah satu strategi dari Taman Nasional agar kolaborasi dan kerjasama dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Strategi tersebut dibutuhkan untuk memperkuat kesadaran konservasi dan kepedulian masyarakat, mengurangi tekanan masyarakat terhadap wilayah kawasan konservasi, dan juga dapat mengatasi keterbatasan sumber daya dari UPT Taman Nasional (*baik dari keterbatasan jumlah personil maupun pendanaan*) dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya. Pengalaman UPT Taman Nasional Lore Lindu dan Bogani Nani Wartabone menunjukkan adanya ketiga dampak positif tersebut untuk mendukung tugas dan fungsi yang diemban Taman Nasional.

Dari sisi pendanaan, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan masih memiliki ketergantungan terhadap pembiayaan dari APBN maupun bantuan dari donor melalui program atau proyek. Beberapa proyek yang selama ini membantu upaya pemberdayaan masyarakat antara lain EPASS UNDP (Lore Lindu dan BNW) dan Forest Programme III di Lore Lindu. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilaksanakan melalui dukungan donor tersebut dipandang sebagai tahapan inisiasi, dimana replikasinya melalui APBN memerlukan sedikit penyesuaian, terutama dari sisi intensitas pendampingan dan jumlah dana yang dialokasikan pada kelompok masyarakat mitra.

Pendanaan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan konservasi merupakan peluang sekaligus tantangan untuk mengeksplorasi sumber pendanaan alternative untuk konservasi dan pemberdayaan kemiskinan. Sebagai contoh, keterbatasan anggaran dari Taman Nasional untuk penyediaan tanaman penghidupan dalam rangka restorasi ekosistem dan penyediaan saluran pipa untuk pemanfaatan jasa lingkungan air dari TN-BNW dipenuhi dengan memanfaatkan *top-up* dari anggaran Dana Desa. Sedangkan di Taman Nasional Lore Lindu, anggaran pemberdayaan non-konservasi yang dialokasikan kepada beberapa desa target membuat fokus sebagian kelompok masyarakat terbagi sehingga sedikit mempengaruhi progress kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Taman Nasional.

Tabel 8: Peluang dan Tantangan Kegiatan Konservasi melalui Pemberdayaan Masyarakat

	Taman Nasional	Masyarakat
Peluang	✓ Memperkuat hubungan Taman Nasional dengan masyarakat di sekitar kawasan konservasi; ✓ Mensiasati keterbatasan sumber daya dalam melakukan tugas dan fungsi melalui pelibatan masyarakat; ✓ Pendanaan alternatif untuk kegiatan konservasi dalam pemberdayaan masyarakat (misal: Surat Berharga Syariah Negara untuk mendukung ekowisata, Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu) belum banyak tereksplorasi oleh UPT.	✓ Mendapatkan akses untuk pemanfaatan sumber daya (jasa lingkungan, zona pemanfaatan HHBK) di Taman Nasional secara berkelanjutan; ✓ Mendapatkan dukungan dan pendampingan dari Taman Nasional dalam kegiatan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat; ✓ Dalam jangka panjang, kegiatan yang didampingi Taman Nasional diharapkan dapat menjadi mata pencaharian berkelanjutan yang menghasilkan penghidupan bagi masyarakat dan bila memungkinkan juga menjadi sumber pendanaan bagi kegiatan konservasi; ✓ Dana pemberdayaan dari Taman Nasional dapat dikombinasikan dengan sumber pendanaan pembangunan lainnya, seperti Dana Desa dan APBD.
Tantangan	- Belum adanya petunjuk atau panduan yang jelas (<i>roadmap atau blueprint</i>) bagi para pihak dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi; - Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (pengetahuan dan pengalaman) di UPT Taman Nasional untuk melakukan pendampingan dalam pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat; - Tupoksi dan wewenang Taman Nasional yang terbatas pada wilayah Taman Nasional memerlukan kolaborasi lintas sektor dengan pihak lain, terutama dengan Pemerintah Daerah dan mitra lokal, untuk mendukung dan mensinergikan pemberdayaan ekonomi masyarakat; - Jumlah pendanaan terbatas, masih mengandalkan pendanaan APBN dan donor.	- Dana yang didapat masyarakat relatif lebih kecil dibanding dana pembangunan lainnya (mis. Dana Desa); - Banyaknya bantuan dan program yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat oleh instansi pemerintah pusat dan daerah maupun mitra TN membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan dapat menjadi tumpang tindih; - Keberlanjutan kegiatan yang diusulkan masih sangat tergantung pada aktor penggerak di skala lokal (<i>local champion/leader</i>) - Kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi masih terbatas (mis. Ekowisata)

Sumber: Wawancara dengan BBTN Lore Lindu dan BBTN Bogani Nani Wartabone

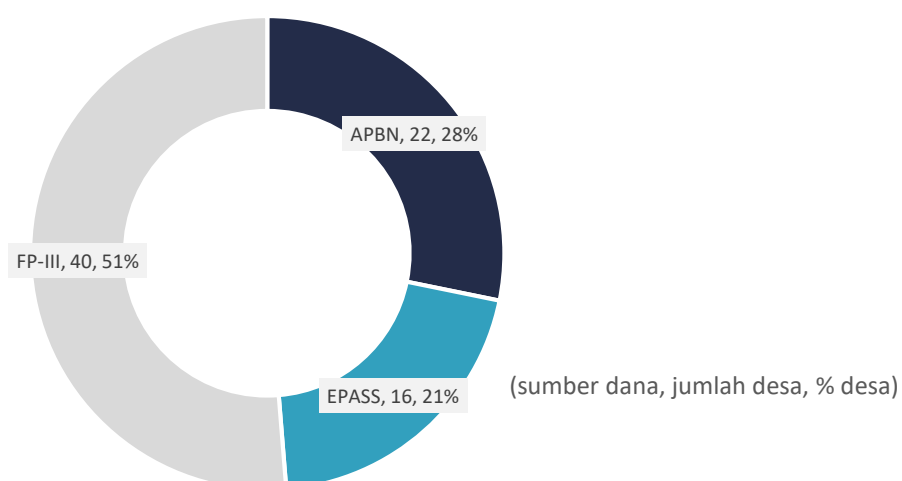
Taman Nasional Lore Lindu

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Taman Nasional Lore Lindu difokuskan pada pembinaan daerah penyangga yang terdiri dari 82 Desa. Pembinaan tersebut antara lain meliputi

- Pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar kawasan dalam kegiatan pertanian dan ekowisata
- Stimulus kegiatan ekonomi melalui pemberian alat produksi dan hewan ternak
- Fasilitasi pemanfaatan produk-produk Hasil Hutan Bukan Kayu, yang antara lain meliputi madu, gula aren, dan kerajinan rotan
- Fasilitasi pemanfaatan area kawasan Taman Nasional untuk kegiatan ekowisata masyarakat
- Pemulihan ekosistem kolaboratif bersama masyarakat desa
- Penyadartahuan masyarakat melalui pendidikan konservasi
- Pemberian akses kelola kepada masyarakat di sekitar kawasan konservasi

Dari 82 desa penyangga TN Lore Lindu, sebanyak 78 desa ditargetkan sebagai desa yang menjadi mitra dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Saat ini, 71% atau sebanyak 56 dari 78 desa yang ditargetkan sebagai Desa Pemberdayaan direncanakan untuk didanai dari program bantuan donor, yaitu FP-III dan EPASS yang akan berakhir pada tahun 2021 (Gambar 1). Terdapat perbedaan jumlah alokasi pendanaan per kelompok masyarakat, dimana desa yang mendapat pendanaan APBN mendapat alokasi dana sebesar Rp50 juta sedangkan desa yang didukung oleh proyek donor mendapat alokasi dana kemitraan sebesar Rp120 juta.

Pada tahun 2018, TN Lore Lindu pernah mengusulkan pendanaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk membiaya pengembangan infrastruktur jalan guna mendukung pengembangan ekowisata di Taman Nasional, namun belum berhasil mendapatkan pembiayaan tersebut karena berbagai keterbatasan di proses pengusulan. Saat ini TN Lore Lindu bersama Pemerintah Kabupaten Poso dan Sigi sedang mempersiapkan pengusulan secara lebih matang, dengan mempersiapkan data dan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan SBSN secara lebih rinci.



Gambar 1: Jumlah Desa Pemberdayaan dan Sumber Pendanaan di Taman Nasional Lore Lindu 2020

Sumber: Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, 2020

Karena implementasi kegiatan yang masih cukup awal, pemberdayaan ekonomi masyarakat dari TN Lore Lindu belum memiliki dampak ekonomi yang berarti untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara umum. Terdapat beberapa tokoh lokal yang berhasil melaksanakan ekowisata dan HHBK, namun skalanya masih terbatas. Secara keseluruhan, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan TN Lore Lindu saat ini masih bersifat melengkapi dan belum dapat menggantikan mata pencaharian utama dari masyarakat di sekitar kawasan. Walaupun dampak dari sisi ekonomi belum dapat dirasakan secara langsung, relasi dan kerjasama TN dengan masyarakat sekitar kawasan dirasakan semakin membaik sebagai dampak positif dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan TN Lore Lindu.

Beberapa tantangan yang dihadapi TN Lore Lindu dalam mendorong keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari konservasi kawasan Taman Nasional di Lore Lindu membutuhkan suatu *blueprint* atau *roadmap* yang menjadi rujukan semua pihak untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di kawasan sekitar Taman Nasional. Blueprint atau roadmap tersebut memberikan panduan rinci mengenai tahapan dan langkah-langkah pemberdayaan yang perlu dilakukan oleh Balai TN selaku pengelola kawasan konservasi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.
2. Perlunya kerjasama dan sinergi bersama parapihak, termasuk LSM, mengenai isu prioritas dan sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Taman Nasional Lore Lindu.
3. Beberapa kelompok masyarakat di desa sekitar kawasan konservasi mulai jenuh dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat karena banyaknya program atau proyek serupa dalam waktu yang bersamaan dari instansi yang berbeda. Tumpang tindih kegiatan menyebabkan beberapa kelompok masyarakat di lokasi yang sama menjalani proses identifikasi kebutuhan (*needs assessment*) berkali-kali karena setiap program mempunyai metode berbeda dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Selain itu, ada desa/kawasan yang over-exposure karena terlalu banyak program yang datang, dan ada yang kurang mendapat perhatian karena mendapat lebih sedikit program pemberdayaan. Untuk itu diperlukan adanya sinergi dan koordinasi yang melibatkan Taman Nasional dan desa penyangga bersama parapihak untuk mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat.
4. Tugas dan fungsi pemberdayaan merupakan tugas baru bagi personel Taman Nasional, sehingga personel Taman Nasional masih perlu beradaptasi dan belajar dalam mengimplementasikan tugas tersebut. Pemangku TN Lore Lindu masih berusaha menemukan formula yang tepat dalam melakukan tugas pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

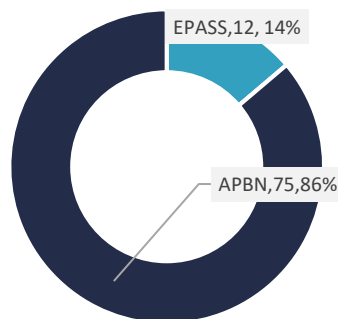
Taman Nasional Bogani Nani Wartabone

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone difokuskan pada pembinaan daerah penyangga yang terdiri dari 143 desa. Pembinaan tersebut antara lain meliputi:

- Pengembangan HHBK seperti jahe merah, kemiri, pisang, damar, kopi, gula aren dan gula semut
- Pemanfaatan air non-komersial
- Pengembangan ekowisata dan wisata alam
- Pemulihan ekosistem kolaboratif

- Pembangunan pembangkit listrik mikrohidro
- Penguatan kapasitas masyarakat dalam keterampilan untuk menunjang kegiatan ekonomi
- Pengembangan dan penyadartahuan konservasi melalui edukasi
- Konservasi maleo berbasis masyarakat
- Pengembangan ternak ayam kampung

Dari 143 desa penyangga kawasan TN Bogani Nani Wartabone, sebanyak 87 desa ditargetkan sebagai Desa yang menjadi mitra dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan wawancara, kemitraan bersama masyarakat telah dilakukan di 12 desa yang terdiri dari 17 kelompok tani binaan dengan sumber pendanaan berasal dari proyek EPASS yang akan segera berakhir, namun secara bertahap pendanaan untuk pemberdayaan dan kemitraan bersama masyarakat akan digantikan oleh dana APBN. Dalam lima tahun ke depan ditargetkan ada 75 desa yang akan dibina melalui pembiayaan APBN (Gambar 2).



(Sumber dana, jumlah desa, %desa)

Gambar 2: Jumlah Desa Pemberdayaan dan Sumber Pendanaan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone 2020

Sumber: Balai Besar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, 2020

Selain mengandalkan sumber dana yang difasilitasi TN BNW, masyarakat di sekitar kawasan juga memanfaatkan dana pembangunan lainnya untuk menunjang kegiatan pemberdayaan yang diinisiasi TN BNW. Perwakilan TN BNW menyatakan bahwa masyarakat dari desa pemberdayaan menggunakan Dana Desa untuk membangun sarana prasarana di kegiatan ekowisata, menambah pengadaan bibit sebagai bagian dari kegiatan pemulihan ekosistem, serta melakukan pipanisasi untuk memanfaatkan sumber air dari Taman Nasional untuk keperluan desa.

Pendekatan menggunakan pendanaan alternatif merupakan inovasi yang dapat dikembangkan dan direplikasi di kawasan konservasi lainnya, terutama dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Saat ini TNBNW sedang mempersiapkan dokumen dan kolaborasi bersama Pemerintah Daerah yang dibutuhkan untuk mengusulkan pembiayaan pengembangan akses untuk wilayah ekowisata di Taman Nasional melalui pendanaan Surat Berharga Syariah Negara.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, TNBNW tidak memiliki data sebagai acuan untuk mengukur kontribusi kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk menghubungkan produk-produk HHBK Taman Nasional dengan pasar, namun masih bersifat lokal di skala Kabupaten. Produk HHBK TNBNW, antara lain kemiri dan gula aren, memiliki potensi yang sangat baik untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun banyak produk HHBK Taman Nasional yang pasarnya terbatas di tengkulak, sehingga membutuhkan intervensi dari Pemerintah Daerah agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang pantas.

TNBNW menganggap upaya pemberdayaan yang mereka lakukan dengan sumber daya yang dimiliki merupakan inisiasi dan memerlukan dukungan serta intervensi dari sektor non-konservasi agar dapat memberikan dampak kesejahteraan yang berarti bagi masyarakat. Dalam hal skala cakupan program, masyarakat yang didampingi jumlahnya sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk target pemberdayaan yang ada di sekitar kawasan. Untuk itu diharapkan keberhasilan dari kegiatan pemberdayaan dari TN - terutama kegiatan pemanfaatan HHBK, pemulihan restorasi ekosistem, dan ekowisata - mampu menarik minat masyarakat lain yang belum mengikuti pembinaan untuk melakukan kegiatan tersebut secara mandiri. Sedangkan dari sisi konservasi, kepedulian masyarakat binaan untuk menjaga wilayah TNBNW mulai muncul sebagai salah satu dampak dari kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi TNBNW dalam mendorong keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peran serta dan sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan belum optimal. Mengingat tupoksi dan kewenangan TN yang terbatas di kawasan konservasi, Pemerintah Daerah harus lebih terlibat dan berperan dalam mendampingi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Taman Nasional. Hal ini diperlukan antara lain dalam menguatkan rantai pasar dari produk-produk HHBK dan kegiatan pariwisata yang didampingi TNBNW
2. Terbatasnya kapasitas personel dan sumber pendanaan yang dimiliki TNBNW untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi.
3. Belum ada *roadmap* sebagai panduan dan tolok ukur keberhasilan bagi TNBNW dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat,
4. Terbatasnya kapasitas masyarakat untuk mendukung implementasi kegiatan pemberdayaan ekonomi. Selain peningkatan kapasitas, perlu dilakukan pendampingan yang lebih intensif agar masyarakat lebih mampu mengeksekusi dan berkomitmen dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan TN. Mekanisme konsekuensi atau sanksi bagi masyarakat dapat dipertimbangkan apabila pemberdayaan ekonomi tidak berhasil atau berhenti bergulir karena kurangnya komitmen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi hanya boleh untuk kegiatan non-komersil, sehingga jasa lingkungan air di TNBNW tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Namun Undang-Undang ini mengakibatkan kegiatan komersil yang direncanakan oleh masyarakat sekitar kawasan untuk memanfaatkan sumber daya air dari TNBNW sebagai air minum kemasan menjadi tidak memungkinkan.

Bab 5.

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Kegiatan Konservasi

Tujuan Pembangunan Nasional (TPB) atau yang juga dikenal di skala global sebagai *Sustainable Development Goals/SDG* merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh mayoritas negara di dunia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. TPB terdiri 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030².

Kegiatan konservasi, selain bertujuan untuk menjaga keanekaragaman hayati, juga harus dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tupoksinya, berbagai kegiatan KLHK pada akhirnya bertujuan untuk melakukan konservasi dari sumber daya alam dan kehati yang dimiliki oleh Indonesia. Di dalam TPB, tupoksi langsung dari KLHK antara lain terwakili di dalam Tujuan 13 mengenai Perubahan Iklim, Tujuan 14 tentang Ekosistem Lautan, dan Tujuan 15 tentang Ekosistem Daratan. Selanjutnya pada laporan ini, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15 dalam TPB akan dikelompokkan sebagai tujuan konservasi kehati, sedangkan tujuan lainnya adalah tujuan non-konservasi.

Dalam pelaksanaannya, tentunya kegiatan konservasi tersebut tentunya juga dapat dikombinasikan dengan berbagai kegiatan pembangunan lain yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan non-konservasi, seperti pengentasan kemiskinan, pertanian berkelanjutan, dan meningkatkan akses terhadap air bersih.

Dengan menggunakan Kerangka Tujuan Pembangunan Nasional (TPB atau *Sustainable Development Goals/SDG*), maka bab ini mencoba untuk menganalisis potensi kegiatan konservasi yang dilakukan KLHK dalam mendukung pencapaian berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tidak secara langsung berkaitan dengan konservasi kehati.

Beberapa Tujuan Pembangunan yang tidak secara langsung terkait tujuan konservasi kehati namun pencapaiannya dapat didukung oleh kegiatan konservasi yang dilakukan KLHK antara lain:

TPB 1 - Akhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun

Keanekaragaman hayati menyediakan sumber daya dan pendapatan, khususnya bagi masyarakat miskin pedesaan. Layanan ekosistem dan barang-barang non-pasar lainnya mencapai antara 50% dan 90% dari total sumber mata pencaharian rumah tangga miskin pedesaan dan penghuni hutan.

²[https://www.sdg2030indonesia.org/#:~:text=Sustainable%20Development%20Goals%20\(SDGs\)%20merupakan,dapat%20dicapai%20pada%20tahun%202030.](https://www.sdg2030indonesia.org/#:~:text=Sustainable%20Development%20Goals%20(SDGs)%20merupakan,dapat%20dicapai%20pada%20tahun%202030.)

TPB 2 - Akhiri kelaparan, capai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik; mempromosikan berkelanjutan pertanian

Keanekaragaman hayati adalah elemen kunci dari ketahanan pangan dan sarana untuk meningkatkan nutrisi. Banyak orang yang rentan bergantung pada makanan yang dikumpulkan dari ekosistem alami, seperti hutan, padang rumput, lautan dan sungai. Keanekaragaman hayati juga mendukung fungsi ekosistem, seperti penyerbukan dan pemeliharaan kesuburan tanah, dan kualitas air, penting bagi produktivitas pertanian.

TPB 3 - Memastikan hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia

Hampir 1 dari 4 kematian secara global disebabkan oleh faktor risiko lingkungan. Ekosistem yang sehat membantu mengurangi penyebaran dan dampak pencemaran dengan cara menyita dan menghilangkan jenis-jenis tertentu polusi udara, air dan tanah. Keanekaragaman hayati pertanian berkontribusi pada peningkatan produksi berkelanjutan, mengurangi kebutuhan akan pestisida dan input bahan kimia lainnya, yang menghasilkan manfaat bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, sebagian besar populasi dunia bergantung pada obat-obatan tradisional yang didapat dari keanekaragaman hayati untuk kebutuhan perawatan kesehatan mereka.

TPB 5 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan

Perempuan memainkan peran penting dalam pertanian, nutrisi, dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Mengakui peran perempuan sebagai pengelola lahan dan sumber daya alam utama adalah penting untuk berkelanjutan pengembangan. Selain itu, hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem terkait dapat melanggengkan ketidaksetaraan gender dengan meningkatkan waktu yang dihabiskan oleh perempuan dan anak-anak dalam melakukan tugas-tugas tertentu

TPB 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang ketersediaannya maupun kualitasnya harus dijamin untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup manusia, sehingga dapat menghasilkan SDM yang mampu mendukung dan mendorong pembangunan nasional. Penyediaan dan kualitas air bersih sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam dan kehati, dimana ekosistem kawasan konservasi serta wilayah DAS berperan penting dalam menjaga serta meningkatkan ketersediaan air bersih. Untuk itu, diperlukan upaya pengelolaan ekosistem dan kehati secara terpadu untuk memastikan ketersediaan air bersih yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

TPB 8 Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua

Sumber daya alam dan kehati memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan membuka lapangan kerja, terutama di skala lokal. Kegiatan konservasi dapat dikemas sebagai komoditas ekonomi melalui berbagai pendekatan pengelolaan kehati secara berkelanjutan, misalnya melalui pemanfaatan hasil produk hutan bukan kayu, pertanian hijau, maupun kegiatan ekowisata.

Tabel 9 dan Tabel 10 di bawah menguraikan alokasi anggaran kegiatan konservasi kehati KLHK untuk Sulawesi pada tahun 2019 dan 2020 untuk yang berpotensi secara tidak langsung untuk mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan non-konservasi kehati (selain capaian Tujuan 13, Tujuan 14, dan Tujuan 15 di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Tabel 9: Anggaran KLHK untuk Sulawesi terkait Tujuan dan Target TPB non-konservasi kehati tahun 2019 dan 2020

Tujuan dan Target TPB Non-konservasi kehati	2019		2020		Total
	000 Rupiah	%	000 Rupiah	%	000 Rupiah
Tujuan 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam segala Bentuk dimanapun	86.669.251	13,03%	45.909.522	13,88%	132.578.773
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	86.669.251	13,03%	45.909.522	13,88%	132.578.773
Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	600.000	0,09%	-	0,00%	600.000
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian	600.000	0,09%	-	0,00%	600.000
Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	510.203.567	76,70%	239.084.081	72,27%	749.287.648
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas bila diperlukan	17.907.568	2,69%	288.100	0,09%	18.195.668
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau	492.295.999	74,01%	238.795.981	72,19%	731.091.980
Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua	67.737.021	10,18%	45.806.980	13,85%	113.544.001
8.3 Mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan	33.513.812	5,04%	40.360.383	12,20%	73.874.195

Tujuan dan Target TPB Non-konservasi kehati	2019		2020		Total 000 Rupiah
	000 Rupiah	%	000 Rupiah	%	
menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan					
8.9 Pada tahun 2030, merancang dan mengimplementasikan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	34.223.209	5,14%	5.446.597	1,65%	39.669.806
Total (Tujuan 1 + 2 + 6 +8)	665.209.839	100	330.800.583	100	996.010.422

Catatan: “?” merupakan output yang terkait langsung dengan tujuan konservasi (Tujuan 13, 14, dan 15 di dalam TPB)

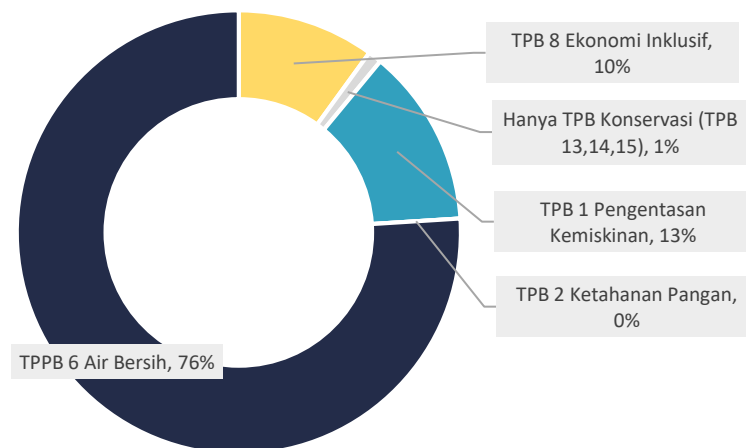
Tabel 9 dan Tabel 10 menggambarkan bahwa kegiatan konservasi yang dilakukan KLHK di Sulawesi juga memiliki potensi untuk mendukung pencapaian TPB yang tidak secara langsung bertujuan atau berkaitan dengan konservasi kehati. TPB lain yang juga turut didukung kegiatan KLHK di Sulawesi antara lain Tujuan 1 terkait pengentasan kemiskinan, Tujuan 2 terkait ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, Tujuan 6 tentang Air Bersih dan Sanitasi, serta Tujuan 8 tentang Ekonomi Inklusif.

Dari analisis keterkaitan antara Output Renja Kelima Ditjen KLHK dengan Target dan Tujuan TPB non-konservasi kehati, mayoritas kegiatan konservasi kehati yang dialokasikan KLHK untuk Wilayah Sulawesi memiliki keterkaitan yang erat dengan TPB non-konservasi kehati. Keterkaitan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar rencana kegiatan KLHK di Sulawesi juga dapat berkontribusi bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan non-konservasi kehati (selain Tujuan 13, 14, dan 15). Pada tahun 2019, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang berpotensi mendukung TPB non-konservasi kehati mencapai Rp665 miliar, atau sebesar 99% dari total anggaran keseluruhan. Sedangkan pada tahun 2020 94% anggaran KLHK untuk Wilayah Sulawesi berpotensi untuk berkontribusi dalam mencapai target TPB non-konservasi kehati (Gambar 2 dan Gambar 3).

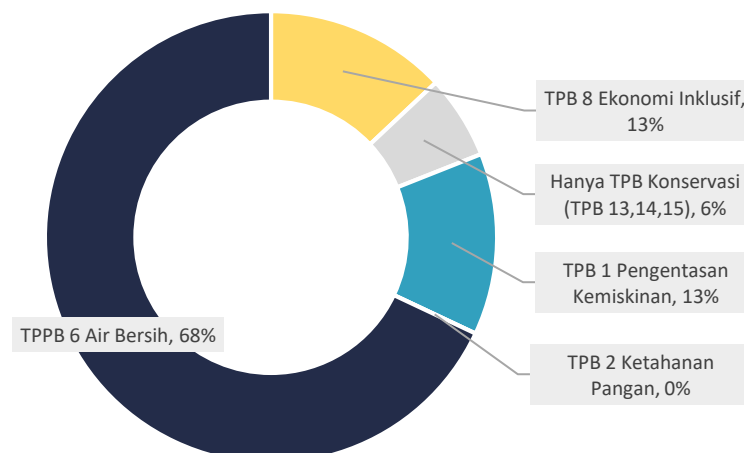
Sebagian besar alokasi anggaran kegiatan konservasi KLHK pada tahun 2019 di Sulawesi mendukung Tujuan 6 dari TPB, dengan jumlah total Rp510,2 miliar (Tabel 9 dan Tabel 10). Alokasi anggaran yang mendukung tujuan 6 tersebut mewakili sekitar 76,7% dari total anggaran tahun 2019. Proporsi serupa juga dialokasikan pada tahun 2020, dimana sekitar 72,2% dari total anggaran KLHK dialokasikan untuk Tujuan 6. Sebagian besar anggaran terkait Tujuan 6 dialokasikan untuk kegiatan terkait Target 6.6, yaitu perlindungan dan restorasi ekosistem yang berperan dalam penyediaan sumber daya air. Kegiatan Rehabilitasi Vegetatif (Output 017 untuk tahun 2019 dan Output 002 tahun 2020) merupakan output yang mendapat alokasi anggaran terbesar dan turut berkontribusi pada pencapaian Target TPB 6.6 mengenai Perlindungan dan Restorasi Ekosistem terkait Sumber Daya Air (Tabel 9).

Kurang lebih 13% dari alokasi anggaran KLHK di Sulawesi pada tahun 2019 dan 2020 berpotensi untuk mendukung capaian Target dan Tujuan 1 dari TPB mengenai Pengentasan Kemiskinan. Jumlah yang dialokasikan terkait Tujuan 1 menurun dari Rp86,6 miliar (sekitar USD6,4 juta dengan kurs 1USD = Rp13.500) menjadi Rp45,9 miliar (USD3,4 juta) pada tahun 2020, namun secara proporsi alokasi anggaran tetap di level yang dengan proporsi pada tahun 2019. Anggaran kegiatan KLHK yang beririsan dengan Tujuan 1 terutama mendukung pencapaian TPB Target 1.4 mengenai akses terhadap sumber daya alam, ekonomi, dan lahan. Hal ini dikontribusikan oleh output terkait pemberian akses terhadap lahan, antara lain melalui program TORA, dan pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif bersama masyarakat sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat desa, seperti melalui pengamanan bersama serta pemberian bibit berkualitas dan sarpras pertanian untuk mendukung kegiatan pertanian masyarakat (Tabel 10).

Alokasi anggaran yang berkaitan dengan pencapaian Tujuan 8 mengenai Ekonomi Inklusif pada tahun 2019 adalah sebesar Rp34 miliar, dimana mayoritas kegiatan konservasi di Sulawesi terkait Tujuan 8 berkaitan dengan ekowisata dan beririsan dengan Target 8.9 mengenai pariwisata berkelanjutan. Sedangkan pada tahun 2020, sebagian besar alokasi anggaran terkait Tujuan 8 mendukung pencapaian Target 8.3 melalui kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, terutama melalui kegiatan ekowisata, serta Kemitraan Usaha melalui Perhutanan Sosial bersama masyarakat.



Gambar 3: Proporsi Anggaran KLHK untuk Sulawesi terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019



Gambar 4: Proporsi Anggaran KLHK untuk Sulawesi terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2020

Tabel 10: Alokasi Anggaran dan Output KLHK di Sulawesi 2019-2020 terkait TPB non-konservasi kehati

Target TPB non-konservasi kehati	Tahun				Total
	2019 000 Rupiah	%	2020 000 Rupiah	%	
1.4 Pada tahun 2030 menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, akses terhadap pelayanan dasar, penguasaan dan kontrol atas tanah serta bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang layak	86.669.251	13,0%	45.909.522	13,9%	132.578.773
001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan	-	0,0%	522.350	0,2%	522.350
001-Luas Hutan Yang Dikelola Masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR dan Kemitraan Kehutanan	5.500.000	0,8%	-	0,0%	5.500.000
001-Pemolaan dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat	1.143.942	0,2%	-	0,0%	1.143.942
001-Penanganan Konflik dan Tenurial	357.000	0,1%	-	0,0%	357.000
001-Penyediaan Benih Berkualitas dan Materi Genetik Unggul	4.341.894	0,7%	-	0,0%	4.341.894
002-Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	-	0,0%	6.878.586	2,1%	6.878.586
002-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan	2.816.529	0,4%	-	0,0%	2.816.529
002-Penyediaan Bibit Berkualitas	5.250.000	0,8%	-	0,0%	5.250.000
002-Penyelenggaraan Verifikasi Hutan Adat	1.850.000	0,3%	-	0,0%	1.850.000
003-Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi klaster TSP/PSP	2.621.921	0,4%	-	0,0%	2.621.921
003-Hutan Adat yang ditetapkan	-	0,0%	317.410	0,1%	317.410
003-Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	-	0,0%	15.992.003	4,8%	15.992.003
003-Luas penyiapan Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS	-	0,0%	2.919.897	0,9%	2.919.897
004-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH	-	0,0%	2.252.798	0,7%	2.252.798
005-Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	11.991.184	1,8%	-	0,0%	11.991.184
006-Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	22.422.223	3,4%	5.876.754	1,8%	28.298.977
007-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga	-	0,0%	8.979.807	2,7%	8.979.807
007-Penyiapan prakondisi dan pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat melalui kemitraan konservasi	2.943.660	0,4%	-	0,0%	2.943.660

Target TPB non-konservasi kehati	Tahun				Total
	2019 000 Rupiah	%	2020 000 Rupiah	%	
008-Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan konservasi (Bina Daerah Penyangga)	1.703.748	0,3%	-	0,0%	1.703.748
010-Penyiapan prakondisi dan pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat melalui kemitraan konservasi	1.966.000	0,3%	-	0,0%	1.966.000
012-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH	-	0,0%	2.169.917	0,7%	2.169.917
015-Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan TSL	180.000	0,0%	-	0,0%	180.000
022-Energi listrik yang dihasilkan dari Mini/Mikro Hidro di sekitar dan di dalam Kawasan Konservasi	300.000	0,0%	-	0,0%	300.000
029-Energi listrik yang dihasilkan dari Mini/Mikro Hidro di sekitar dan di dalam Kawasan Konservasi	300.000	0,0%	-	0,0%	300.000
031-Pengamanan Kolaboratif KPH Bersama Masyarakat	18.196.150	2,7%	-	0,0%	18.196.150
034-Kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial yang terbentuk dan berfungsi	2.070.000	0,3%	-	0,0%	2.070.000
041-Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan konservasi (Bina Daerah Penyangga)	715.000	0,1%	-	0,0%	715.000
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian	600.000	0,1%	-	0,0%	600.000
033-Intervensi metode agroengineering di daerah buffer TN Lore Lindu	600.000	0,1%	-	0,0%	600.000
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas bila diperlukan	17.907.568	2,7%	288.100	0,1%	18.195.668
003-Data Kinerja DAS	2.470.000	0,4%		0,0%	2.470.000
003-Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	-	0,0%	288.100	0,1%	288.100
009-Perlindungan dan Pengamanan berbasis Resort bersama Masyarakat untuk perlindungan kawasan dan sumber air	10.331.096	1,6%	-	0,0%	10.331.096
011-Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air	4.306.472	0,6%	-	0,0%	4.306.472

Target TPB non-konservasi kehati	Tahun				Total
	2019		2020		
	000 Rupiah	%	000 Rupiah	%	
019-Internalisasi RPDAS dalam RTRW	800.000	0,1%	-	0,0%	800.000
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau	492.295.999	74,0%	238.795.981	72,2%	731.091.980
002-Rehabilitasi Hutan Mangrove	4.453.836	0,7%	229.469.960	69,4%	233.923.796
003-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil Teknis	-	0,0%	4.657.103	1,4%	4.657.103
006-Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai	-	0,0%	4.668.918	1,4%	4.668.918
011-Perlindungan dan Pengamanan berbasis Resort bersama Masyarakat untuk perlindungan kawasan dan sumber air	5.197.118	0,8%	-	0,0%	5.197.118
012-Penyediaan Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif	19.120.000	2,9%	-	0,0%	19.120.000
013-Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air	3.258.588	0,5%	-	0,0%	3.258.588
017-Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif	451.043.797	67,8%	-	0,0%	451.043.797
018-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil Teknis	6.895.500	1,0%	-	0,0%	6.895.500
020-Penyediaan Sarana Pengendalian Kerusakan Perairan Darat	2.327.160	0,3%	-	0,0%	2.327.160
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	33.513.812	5,0%	40.360.383	12,2%	73.874.195
001-Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	3.595.170	0,5%	-	0,0%	3.595.170
001-Jumlah Komunitas Kemitraan Lingkungan	120.000	0,0%	-	0,0%	120.000
001-Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	12.936.320	1,9%	-	0,0%	12.936.320
001-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang terbentuk	-	0,0%	920.400	0,3%	920.400
001-Mitra Perhutanan Sosial yang diberdayakan	-	0,0%	267.000	0,1%	267.000
001-SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari	-	0,0%	360.000	0,1%	360.000
001-Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia	-	0,0%	7.498.000	2,3%	7.498.000
002-Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	-	0,0%	5.291.195	1,6%	5.291.195

Target TPB non-konservasi kehati	Tahun				Total
	2019 000 Rupiah	%	2020 000 Rupiah	%	
002-Jumlah fasilitasi peningkatan produksi hasil hutan dan jasa lingkungan	7.800.000	1,2%	-	0,0%	7.800.000
002-Jumlah generasi muda Lingkungan Hidup yang meningkatnya kapasitasnya	240.000	0,0%	-	0,0%	240.000
002-Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	-	0,0%	1.417.011	0,4%	1.417.011
002-Penyediaan	8.822.322	1,3%		0,0%	8.822.322
002-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	-	0,0%	3.434.950	1,0%	3.434.950
004-Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN	-	0,0%	19.346.827	5,8%	19.346.827
005-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dikembangkan	-	0,0%	1.825.000	0,6%	1.825.000
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	34.223.209	5,1%	5.446.597	1,6%	39.669.806
001-Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	-	0,0%	5.446.597	1,6%	5.446.597
021-Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi	14.443.280	2,2%	-	0,0%	14.443.280
027-Pengembangan Ekowisata dan wisata bahari pada Kawasan Konservasi	7.609.000	1,1%	-	0,0%	7.609.000
039-Sarana Prasarana Ekowisata Taman Nasional Model SBSN	10.967.815	1,6%	-	0,0%	10.967.815
041-Pengembangan ekowisata pada Kawasan Konservasi yang mendukung 7 Destinasi Wisata Prioritas dan 2 KEK Pariwisata	1.203.114	0,2%	-	0,0%	1.203.114
Total (Target 1.4+2.3+6.5+6.6+8.3+8.9)	665.209.839	100%	330.800.583	100,0 %	996.010.422

Bab 6.

Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1 Kesimpulan

- Secara umum, anggaran konservasi yang dialokasikan untuk wilayah Sulawesi setiap tahunnya cukup tinggi, dan tidak hanya dapat berkontribusi untuk konservasi, namun juga untuk berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
- Anggaran konservasi yang dialokasikan Pemerintah Pusat di wilayah Sulawesi bersumber dari kebijakan pendanaan konservasi konvensional serta pemanfaatan mekanisme pembiayaan inovatif untuk kawasan konservasi melalui mekanisme SBSN. Dari berbagai sumber pendanaan tersebut, total anggaran konservasi kehati KLHK untuk Sulawesi berjumlah sebesar Rp669 miliar (sekitar USD48,8 juta pada kurs Rp13.500) pada tahun 2019 dan menjadi Rp352 miliar (USD26 juta) pada tahun 2020. Di tahun 2019 terdapat alokasi anggaran yang cukup besar bagi KLHK untuk implementasi program nasional RHL dan TORA, termasuk di wilayah Sulawesi, sehingga alokasi anggaran KLHK di tahun 2019 menjadi jauh lebih tinggi dari anggaran di tahun 2020.
- Analisis keterkaitan anggaran KLHK dengan Prioritas Nasional (PN) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menunjukkan bahwa kegiatan konservasi dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan serta penyediaan nilai tambah bagi sektor riil dan lapangan kerja. Pada PN terkait penyediaan nilai tambah sektor riil dan lapangan kerja, anggaran KLHK di Sulawesi memberikan kontribusi yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp56,7 miliar (USD4,2 juta dengan kurs 1 USD=Rp13.500) pada tahun 2019, dan Rp32,9 miliar (USD2,3 juta) pada tahun 2020.
- Terdapat kontribusi yang cukup tinggi dari berbagai kegiatan konservasi terhadap PN maupun TPB yang terkait dengan Pengentasan Kemiskinan. Alokasi anggaran KLHK terkait PN pengentasan kemiskinan di Sulawesi pada tahun 2019 dan 2020 mencapai Rp92 miliar (USD6,8 juta dengan kurs 1USD = Rp13.500) dan Rp30 miliar (USD2,2 juta). Sedangkan alokasi anggaran terkait target TPB 1.4 tentang pengentasan kemiskinan adalah Rp86,6 miliar (sekitar USD6,4 juta) pada tahun 2019 dan menurun menjadi Rp45,9 miliar (USD3,4 juta) pada tahun 2020. Penurunan tersebut sebagian besar dikontribusikan dari selesainya pelaksanaan berbagai kegiatan dari program TORA yang ditargetkan pada tahun 2019.
- Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan konservasi memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Namun, saat ini pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan berbagai tantangan dan keterbatasan yang dihadapi Taman Nasional dalam melaksanakan berbagai fungsinya.
- Tantangan yang dihadapi Taman Nasional dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat terutama dalam hal sumber pendanaan yang belum berkelanjutan karena masih mengandalkan APBN, jumlah personil Taman Nasional yang sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah desa penyangga sebagai target pemberdayaan, dan kapasitas personil yang masih minim pengalaman maupun pengetahuan dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan.
- Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Taman Nasional memerlukan dukungan dari para pihak agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan kondisi pemungkin dengan

dukungan parapihak di tingkat pusat maupun daerah agar pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Taman Nasional dapat menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

- Dukungan yang dibutuhkan dari tingkat pusat kepada Taman Nasional berupa dukungan regulasi yang mendorong pelibatan para pihak di skala daerah dalam pemberdayaan masyarakat kawasan, maupun dukungan teknis untuk meningkatkan kemampuan Taman Nasional beserta personilnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan.
- Sedangkan dukungan yang dibutuhkan dari tingkat daerah kepada Taman Nasional berupa koordinasi dan kolaborasi lintas-sektor terkait teknis pelaksanaan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat yang didukung Taman Nasional, terutama dengan sektor pertanian, pariwisata, dan perdagangan.
- Dengan disahkannya Undang-Undang 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, saat ini pemanfaatan jasa lingkungan air dari kawasan suaka alam tidak dapat dilakukan untuk tujuan komersil, sehingga kegiatan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat sekitar kawasan tidak dapat memanfaatkan potensi jasa lingkungan air dari Taman Nasional. Namun di sisi lain, masyarakat sekitar kawasan masih dapat memanfaatkan jasa lingkungan air dari Taman Nasional untuk pembangunan infrastruktur skala lokal, seperti untuk sumber air minum skala desa dan rumah tangga, serta untuk pembangkit listrik mikro-hidro.
- Sumber pendanaan alternatif di tingkat daerah (Dana Desa, APBD, dan *corporate social responsibility*/CSR lokal), maupun di tingkat pusat (Surat Berharga Syariah Negara, dana CSR nasional, dan lain sebagainya), dapat diperhitungkan sebagai inovasi pendanaan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Taman Nasional. Namun Taman Nasional masih memiliki keterbatasan dalam mengakses dan mensinergikan kegiatan pemberdayaan mereka dengan berbagai sumber pendanaan tersebut. Diperlukan dukungan dan Pemerintah Pusat dan kolaborasi yang lebih erat bersama parapihak yang terlibat dalam pembangunan lokal, baik Pemerintah Daerah maupun aktor pembangunan lokal lainnya seperti swasta dan LSM, agar Taman Nasional mampu memanfaatkan berbagai sumber pendanaan inovatif di luar APBN dan bantuan dari donor.
- Sebagai tindak lanjut kegiatan EPASS, perlu dirumuskan strategi untuk menghindari kesenjangan antara kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Taman Nasional menggunakan pembiayaan donor (EPASS) dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Taman Nasional dengan pembiayaan APBN. Hal ini perlu dipertimbangkan agar kualitas dan keluaran kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Taman Nasional terhadap masyarakat sekitar kawasan tetap optimal walaupun menggunakan sumber pembiayaan yang berbeda.

6.2 Rekomendasi tindak lanjut

Berdasarkan hasil kajian, dirumuskan beberapa rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait konservasi kawasan Taman Nasional untuk mengarusutamakan kegiatan konservasi bersama dengan tujuan pembangunan lainnya sebagai berikut:

Kementerian PPN/Bappenas

- Mainstreaming dua arah antara konservasi dan pembangunan sosio-ekonomi kepada para pemangku kepentingan konservasi, sesuai konteks dan kondisi di lapangan
- Pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi KLHK dan Balai TN tentang pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, baik dari sisi perencanaan maupun implementasi

- Mendorong pemerintah daerah untuk mensinergikan dan mengimplementasikan program pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi
- Memberikan bantuan teknis bagi KLHK dan Balai TN dalam melakukan analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*) di kawasan konservasi dan sekitarnya dalam upaya mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen KSDAE dan Balai TN)

- Pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi staf pengelola kawasan Taman Nasional untuk melakukan pemberdayaan masyarakat
- Memaksimalkan pengelolaan kawasan TN untuk menjembatani konservasi dengan pemberdayaan masyarakat, terutama di kawasan penyangga dan lahan keterlanjuran
- Memperkuat sinergi antara Balai TN dengan NGO dan Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi
- Analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*) di kawasan konservasi dan sekitarnya dalam upaya mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan

Lembaga Donor dan Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO

- Mendorong dan memperkuat sinergi antara Balai TN dengan NGO dan Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi

Pemerintah Daerah

- Memperkuat sinergi dengan Balai TN dan pihak lainnya dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi
- Alokasi program dan pendanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi/Taman Nasional

Referensi

- Barrett, C.B., Travis, A.J., Dasgupta, P., 2011. On biodiversity conservation and poverty traps. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 108, 13907-13912.
- FAO.2009. APSFSOS II: Indonesia Forestry Outlook 2020. Working Paper Series. diakses dari <http://www.fao.org/3/am608e/am608e00.pdf> pada 18 Agustus 2020.
- Rai, Jeetesh. "Understanding poverty-environment relationship from sustainable development Perspectives." *J. Geogr. Environ. Earth Sci. Int* (2019): 1-19.
- Roe, D., Mohammed, E.Y., Porras, I., Giuliani, A., 2013. Linking biodiversity conservation and poverty reduction: de-polarizing the conservation-poverty debate. *Conservation Letters* 6, 162-171.
- Schleicher, J., Schaafsma, M., Burgess, N. D., Sandbrook, C., Danks, F., Cowie, C., & Vira, B. (2018). Poorer without it? The neglected role of the natural environment in poverty and wellbeing. *Sustainable Development*, 26(1), 83-98.
- UNDP & UNEP (2015) *Mainstreaming Environment and Climate for Poverty Reduction and Sustainable Development: A Handbook to Strengthen Planning and Budgeting Processes*. Poverty Environment Initiative. diakses dari <https://www.undp.org/content/dam/nairobi-gc-red/PEA/UNDP%E2%80%93UNEP-PEI-2015-Handbook-English.pdf> pada 17 Oktober 2020



Didukung oleh

